

Asi Sastra  
JASSIN  
3-JAKARTA

IVASMAN  
~~SEBUAH MANIFESTE~~ ~~KEBUDAJAAN~~

SEBUAH MANIFESTE ~~KEBUDAJAAN~~

KAMI, pengarang<sup>2</sup>, pelukis<sup>2</sup>, pemusik<sup>2</sup>, tjendekiawan<sup>2</sup> Indonesia dengan ini mengumumkan SEBUAH MANIFESTE KEBUDAJAAN, karena telah ti- balah saatnja untuk dengan terang<sup>2</sup>-an menjatakan pendirian, tjita<sup>2</sup> dan politik kebudayaan nasional kami.

Telah terbukti adanya ketakutan<sup>2</sup> dari hati jang kerdil terha- dap kaum budajawan Indonesia jang dengan patriotisme dan ketjinta- annja mendjalankan kegiatan<sup>2</sup> kreatifnja sebagai pengabdian jang mu- tlak kepada Tuhan, nusa dan bangsa, demokrasi, humanisme dan sosial- isme.

Sesungguhja regenerasi revolusi Indonesia tidak dapat dipisah- posahkan dgn regenerasi kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu kami jang mendukung MANIFESTE ini hendak menjatakan pendirian kami jang te- rus-terang bahwa kami tidak dapat menempuh djalan apa jang dinamakan humanisme universal oleh apa jang dinamakan Angkatan 45 karena digurui oleh doktrin<sup>2</sup> kebudayaan jang tidak sesuai dengan kondisi<sup>2</sup> objektif kami; tetapi sebaliknya kami tidak dapat pula menempuh dj- lan apa jang dinamakan realisme sosialis oleh sedjumlah pengarang dan seniman dalam tahun<sup>2</sup> 50-an karena digurui pula oleh doktrin<sup>2</sup> kebudayaan jang tidak sesuai dgn kondisi<sup>2</sup> objektif kami.

MANIFESTE kami ini akan membuktikan dgn se-terang<sup>2</sup>-nja bahwa ka- mi bukanlah pelarian kaum politisi jang berlindung dibalik topeng- kebudayaan karena bagi kami kebudayaan tidaklah merupakan sub-ordi- nasi politik, dan oleh karena itulah kami bukan politisi, melainkan karjawan<sup>2</sup> jang sebagai konsekweni jg tak mungkin kami hindari ber- maksud mengamalkan Revolusi Indonesia, bukan dgn tjara jg defensif sandja, tetapi terutama dgn tjara jg sekreatif<sup>2</sup>-nja. Oleh karena it- tidaklah perlu diherankan apabila kami berlandaskan PANTJASILA sbg falsafah kebudayaan kami.

I. KEPRIBADIAN DAN KEBUDAJAAN NASIONAL

Dalam pengertian kami jg bersumber dlm hikmah PANTJASILA kebu- dajaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sbg barang mati.

Dlm pengertian kami kebudayaan adalah perdjoangan manusia sbg totalitas dlm menjempurnakan kondisi<sup>2</sup> hidupnja. Oleh sebab itu pul- maka Kebudayaan Nasional bukanlah semata<sup>2</sup> ditandai oleh "watak nas- -ional", tetapi Kebudayaan Nasional adalah perdjoangan nasional dar- suatu bangsa sbg totalitas dlm menjempurnakan kondisi<sup>2</sup> hidup nasio- nalnja.

-2-

Djadi predikat kebudayaan adalah perdjoangan dgn membawa konsekwensi2 jg mutlak dari sektor2-nja seperti kesusastraan dan kesenian. Dari sinilah kami harus mendjelaskan kepada mereka jg masih dapat terpengaruh oleh pendapat2 jg meragu2-kan revolusionernja kebudayaan jg menarik semua kegiatannja sesuai dgn kekuatan2 pokoknja jg revolusioner itu.

Sepenuhja pengertian (kita) tentang kebudayaan seirama dgn PANTJASILA karena PANTJASILA adalah sumbernja, apabila Bung Karno mengatakan: "Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaja PANTJASILA jg saja usulkan itu mendjadi satu realitet, yakni djika kami ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jg merdeka, jg penuh dgn perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permissjuwatan, ingin hidup sempurna dgn ~~maxixix~~ sociale rechtvaardigheid, ingin hidup sedjahtera dan aman, dgn ke-Tuhan-an jg luas dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, ialah perdjoangan, perdjoangan dan sekali lagi perdjoangan".

Betapa djelaenja pengertian Kebudayaan Nasional sbg perdjoangan untuk memperkembangkan dan mempertahankan harga-diri/nasional ditegah2 masjarakat bangsa2. Djadi Kepribadian ~~jgxxx~~ Nasional jg merupakan implikasi dari Kebudayaan Nasional kita itu adalah apa jg ~~ixxxx~~ oleh Presiden Soekarno dirumuskan sbg "Freedom to be free", sehingga Kebudayaan Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jg membebaskan-diri dari penguasaan (tjampurtangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri-dari masjarakat bangsa2 melainkan djustru untuk menjatukan diri dgn masjarakat bangsa2 sbg tjara bebas dan dinamik sbg persaratan2 jg tak dapat ditawar bagi perkembangan jg pesat dari ~~xxxxxxx~~ Kepribadian dan Kebudayaan Nasional kita jg pandangan-duniaja bersumber pada PANTJASILA.

MANIFES ini ingin membuktikan bahwa sbg falsafah demokrasi PANTJASILA menolak sembojan: "The End justifies the Means", sehingga sbg falsafah demokrasi PANTJASILA adalah humanisme kulturil jg pangedjawantahannja harus kami perdjouangkan dlm setiap sektor kehidupan manusia. Perpetjahan nasional akan terdjadi apabila dipatrapkan sembojan a-kulturil "The End justifies the Means" tsb., pendeknja apabila tidak diakui perbedaan antara tudjuan dan tjara sehingga orang menudju tudjuan dgn menjisihkan kxpentingnja tjara mentjapainja. Demikianlah umpamanja dibidang pentjiptaan karya2 artistik dimana orang lebih mementingkan aspek pipagandanja daripada aspek kesusastrannja ~~xxxxxxx~~, adalah setjara corrala, -ir merupakan pelaksanaan dari sembojan "The End justifies the Means" sbg suatu sembojan jg bertentangan dgn PANTJASILA. "The End

-3-

justifies the Means" -- apabila orang mengemukakan apa jg bukan<sup>114</sup> susastraan sbg kesusastraan, apa jg bukan kesesihan sbg kesenian apa jg bukan ilmu-pengetahuan sbg ilmu-pengetahuan, dsb. Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. kosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan kemaan dgn tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jg damai, dimana dap dilakukan pendidikan jg paling sempurna. Kesenian sbg pentjipta karja manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuaan adal kemanusiaan, tetapi apabila tjaranja adalah kemamusiaan dan itu implikasi jg paling esensiil ~~xxx~~ dari PANTJASILA sbg falsafah mokrasi jg kami perdjjoangkan setjara prinsipil.

Dalam perdjjoangan itu kami menghadapi dua matjam bahaja:

Pertama, bahaja jg pertama datangnya dari pendidik2 gadungan atas nama pendidikan nasional ~~xxxxxxx~~ mengge pola kebudajaan asing sebagai konsep pendidikan nasional.

Kedua, bahaja jg lain datangnya dari ketjenderungan pendidik-dungan pula jg mengadajarkan pemudjaan2 demikian rupa, sehingga nimbulkan kebakuan kebudajaan.

Adapun bahaja bagi kebudajaan jg paling mengantjam datangnya ri wilajahnja sendiri, tetapi jg terang ialah bahwa sumber pokok dari bahaja tsb terletak ~~ada~~ ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif. Memang ketjenderungan tsb manifestasinjadak hanja dlm pendewaan, melalakan terdapat djuga dlm pensjetar sbg umpamanja jg kami kenal dlm wilajjah kesusastraan. Sbg manifestisj2 itu bermatjam2, demikianlah pula kesusastraan2 fetisj. Sina terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung disamping fetisjisme dari djiwa-pendendam, demikianlah kesusastraan jg mengabdikan kepada djiwa-pelindung dgn memberikan sandjungan2 setjara ber-lebih2- disamping kesusastraan jg mengabdikan kepada djiwa-pendendam dgn memberikan fitnahan2 setjara ber-lebih2-an pula. Tidak djarang terdidi bahwa kedua matjam kesusastraan fetisj itu mempunjai pretensi "kesusastraan revolusioner", tetapi dlm halnja demikian maka kesusastraan2 fetisj itu kita namakan kesusastraan-dgn "fausse devotion" sbg pengabdianja, jaitu pengabdian-pura2.

Kesusastraan kreatif, berlawananan dgn kesusastraan fetisj, tentjari sumbernja dlm fetisj2, melainkan dlm dirinja sendiri, hingga dgn ini kami menolak fetisjisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesusastraan seperti itu djika menjokong revolusioner daktah bersumber dlm fetisjisme dari djiwa-pelindung, sebaliknya mengkritik eksese2 revolusi tidaklah pula bersumber dlm fetisjisme dari djiwa pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi,

~~Kesusastraan~~ kreatif, berlawanan dengan ~~kesusastraan~~ fetisj, tidak mentjari sumbernja dalam f~~etisj~~2, melainkan dalam dirinja sendiri, sehingga dengan ini kami menolak fatalisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesusastraan seperti itu djika menjokong Revolusi tidaklah bersumber dalam f~~etisj~~isme dari djiwa pelindung, sebaliknya djika mengkritik ~~eksa~~2 Revolusi tidaklah pula bersumber dalam f~~etisj~~isme dari djiwa pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunjai "fausse devotion"; sebaliknya kami pun tidak mempersetikan Revolusi karena kami tidak pula mempunjai "fausse devotion". ~~Teta~~ kami adalah revolusionair !

Kami tidak lebih daripada manusia lainnja, direntjanakan namun berentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dan tidak mempunjai pretensi apa2. Oleh sebab itulah maka kami tidak pernah mengharapkan pertolongan dari daja-kekuatan gaib, melainkan pertjaja kepada diri sendiri. Kami pun tidak akan merasa takut kepada kegagalan2 kami sendiri, karena kegagalan2 itu bukanlah a chir perjuangannya hidup kami.

Dengan ini kami beraksud mempertegas sikap demokrasi dalam menghadapi masalah2 Kebudayaan Nasional.

## II. KAUM-POLITISI DAN KARYAWAN.

Ada tiga tafsiran tentang humanisme Universil, tafsiran2 mana perlu kami kemukakan. Tafsiran yang pertama bersumber dalam surat-kepertjajaan "Gelombang Sejiman Merdeka" yang disusun pada tanggal 18 Februari 1950: "Kami adalah ahli waris yang sab dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami te uskan dengan tjara kami sendiri". Hampir seluruh pengertian dalam surat-kepertjajaan itu bertentangan dengan pengertian kami tentang kebudayaan, karena bagi kami kebudayaan bukanlah kondisi objektif, sehingga tidaklah mungkin/kita-menerima warisan kebudayaan, apalagi kebudayaan dunia. Teranglah sudah bahwa yang dimaksudkan dengan kebudayaan dunia adalah kebudayaan Barat. Kami akan mene

rangkan bahwa sekiranya demikianlah adanya maka kami menolak hu  
me Universal itu.

Tafsiran yang kedua bersumber dalam konsekuensi 1  
dari alam-fikiran Mao Tse-tung tentang kontradiksi, dimana Pemimpi

Tiongkok itu mengatakan bahwa kontradiksi itu ada dua matjam, jaitu  
kontradiksi antagonis, dan kontradiksi non-antagonis, yang pertama  
adalah kontradiksi dengan lawan, dan yang terakhir adalah kontradiksi  
dengan kawan sendiri. Humanisme Universal-menya Universal menurut  
tafsiran yang kedua itu bermaksud mengaburkan perbedaan antara kedua  
matjam kontradiksi itu, dengan perkataan lain bermaksud mengaburkan  
garis pemisah antara lawan dan kawan. Kami akan menerangkan bahwa  
sekiranya demikianlah adanya sebagai yang dilakukan oleh Nica dahu-  
lu, dimana diulurkan kerjasama kebudayaan disatu pihak, tetapi dil-  
kukan aksi militer dilain pihak, maka kami menolak humanisme unive-  
sel itu.

Tafsiran yang ketiga bersumber dalam jalan-fikiran  
bahwa kebudayaan dan kesusastraan itu adalah semata2 nasional, se-  
hingga kebudayaan dan kesusastraan yang universal harus ditolak, ma-  
ka kami akan menerangkan bahwa kami menerima humanisme universal.

Memang benarlah bahwa ketjenderungan kultural itu  
menghajati nilai2 universal, tetapi meneruskan kebudayaan dunia dal-  
arti memandang kebudayaan dunia itu sebagai kondisi2 objektif, seba-  
gai warisan sedjarah, dilihat dari sudut ilmiah dan psychologi tida-  
lah dapat dipertanggung-djawabkan. Fikiran tentang kebudayaan dunia  
sebagai yang dirumuskan oleh Surat-Kepertjajaan Seniman Muda itu di-  
pandang dari sudut idealisme anak2 muda yang belum mempunyai dasar  
berfikir yang kuat dapatlah kita mengerti, tetapi dalam fikiran kam  
kebudayaan dunia itu tidak ada, dan tidak akan pernah ada. Pengerti-  
an kebudayaan dunia itu terlalu luas, dan karenanya terlalu kabur.  
Kami mengetahui bahwa kemanusiaan adalah tunggal, tetapi itu tidak  
berarti bahwa kebudajaanpun adalah tunggal. Malahan fikiran yang be

1. Lkani tanggapan bahwa kebudayaan adalah tunggal pantaslah kita jurigal,  
 Lkani bukan oleh karena kita tidak setuju dengan kebudayaan yang univers  
 melainkan karena fikiran seperti itu memungkinkan timbulnya imperia  
 me kebudayaan sebagai suatu nafsu untuk meradjai negeri dan bangsa  
 lain dilapangan kebudayaan.

Tetapi apabila dengan kebudayaan dunia itu yang dim  
 sudkan bukan kondisi objektif, melainkan perjuangannya sebagai  
 totalitas dalam usahanya mengachiri pertentangan antara manusia dan  
 kemanusiaan, maka kita menjtudjui adjakan untuk meneruskan kebudajr  
 dunia itu, karena dengan demikian kebudayaan dunia itu merupakan "A  
 motive force of history", dan itu sepenuhnya sama dengan fikiran  
 bahwa kebudayaan dunia itu adalah perjuangan dari budi nurani u-  
 niversel dalam memerdekakan setiap manusia dari kungkungan2-bja,  
 perjuangan yang memperjuangkan tuntutan2 Rakjat Indonesia, karena  
 Rakjat dimana2 dibawah kolong langit ini tidak mau ditindas oleh  
 bangsa2 lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan2 apapun, meski-  
 pun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri; mereka menuntut kebe-  
 basan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik yang kare  
 antjamaan didalam-negeri, maupun yang karena antjamaan dari luar-negeri  
 mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif  
 aktivitas sosialnja, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan  
 kebahagiaan masjarakat; mereka menghuntut kebebasan untuk mengeluarkan  
 pendapat, jaitu menuntut hak2 yang lazimnja dinamakan demokrasi.\*

Apabila-itulah pengertiannja tentang humanisme univer-  
 sal, maka kami menerima humanisme universal itu. Tetapi apabila  
 lain halnja maka kamipun mempunjai sikap yang lain pula terhadap huma  
 nisme universal itu. Umpamanya humanisme universal yang diartikan era  
 orang bahwa humanisme universal itu mengadakan orang untuk bersikap  
 "indifferent" terhadap semua aliran (politik), sehingga dengan huma-  
 nisme universal orang harus tolerant terhadap imperialisme dan kolo-  
 nialisme. Memang kami tetap menarik garis pemisah setjara tegas an-  
 \* sikap kritis-konstruktif

antara musuh2 dan sekutu2 Revolusi, antara musuh2 dan sidikutu2 Kebu-  
 jaan, tetapi ini tidak berarti bahwa kami mempunyai sikap sektaris  
 dan chauvinis, karena sikap yang demikian itu da- adalah justru me-  
 ngaburkan garis pemisah tersebut. Apabila kami menentang kolonialisme  
 Belanda maka itu tidaklah berarti bahwa kami membentji setiap orang  
 Belanda, malahan kalau kami membentji kejahatan yang dilakukan oleh  
 seseorang maka itu tidaklah berarti bahwa kami membentji orang yang  
 melakukan kejahatan itu.

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah manu-  
 Musuh kami adalah unsur2 yang membelenggu manusia, dan karenannya ka-  
 ingin membebaskan manusia itu dari belenggu2nya. Dalam perlawanan ka-  
 terhadap musuh2 kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian di-  
 pengertian bahwa kejahatan2nya manusia namun ia masih tetap memantjar-  
 kan sinar-tjahaja Illahi, sehingga konsekwensi kita ialah bahwa kita  
 harus menjelamatkan sinar-tjahaja Illahi tersebut.

Maka kepertjajaan yang kami kumandangkan ialah bahwa ma-  
 sia adalah makhluk yang baik, dan karena itulah maka kami bertjita2  
 membangunkan suatu masyarakat yang kuat tjenderung kearah masyarakat  
 manusia yang baik itu. Maka dengan perdek dapatlah kami mengatakan  
 bahwa penilaian terhadap humanisme universal sebagai humanisme yang  
 mengaburkan aliran2 (politik) yang implikasinya ialah ko-eksistensi  
 dan toleransi antara nasionalisme dan kolonialisme, adalah penilaian  
 terhadap humanisme universal pseudo.

MANIFEST ini menyatakan dengan tegas2 bahwa dilapangan  
 ideologi tidak terdapat ko-eksistensi dan toleransi, karena ko-eksis-  
 tensi dan toleransi itu hanya terhadap dilapangan hubungan antar-manu-  
 sia, jaitu semata2 dalam hubungan sosial saja. Tetapi disamping itu  
 MANIFEST ini dengan tegas2 pula menyatakan bahwa ketjenderungan naif  
 yang mengaburkan imperialisme dengan imperialis, kapitalisme dengan  
 kapitalis, komunisme dengan komunis, dsb. mengandung benih2 fanatisme,  
 chauvinisme dan sektarisme, yang dalam pertumbuhannya nanti akan

Kami  
 Flam  
 Kretaker  
 Pribadi & politik  
 dapat  
 dikecek  
 Indonesia  
 sejarah  
 tafsir  
 keadilan  
 tidak boleh  
 diabaikan  
 politik

- 8 -

119  
 mengaburkan pula batas antara kontradiksi antagonis dan kontradiksi non-antagonis, sehingga semua kontradiksi non-antagonis akan berumah menjadi kontradiksi antagonis.

Persatuan yang telah kita bangun dengan susah-pajah ini hendaklah tidak digrogoti dari dalam oleh unsur-2 negatif seperti fanatisme, chauvinisme dan sektarisme itu dengan teriakan-2 yang menuduh sekutu-2nya sendiri sebagai munafik dan sematjannya, yang dilapangan kebudayaan teriakan itu berbunyi humanisme universal, karena mentjuri-gai kegiatan-2 nasional kreatif atas dasar kompleks kurang harga diri dan iri hati semata.

Djadi disini teranglah sudah posisi kami terhadap masalah humanisme universal itu. MANIFESTO ini menampilkan aspirasi-2 nasional, yaitu pengarahan-2 kepada pembedaan diri ditengah-2 masyarakat bangsa-2 bagi merealisasi kehormatan, (dignitas) (martabat), prestige dan pengaruh, tetapi kami ingin menjaga agar supaya pengarahan-2 tersebut tidak menudj kearah kesombongan nasional dan chauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Adapun implikasi dari aspirasi-2 nasional ini ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannya, artinya bangsa Indonesia dapat terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan disekitarnya, tetapi tjarannya adalah unik dan dinamik. Untuk dapat mempunyai sifat dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa haruslah mempunyai keusastraan sebagai sektor kehidupan kebudayaan yang corollair dalam arti yang sesungguhnya, yaitu keusastraan yang sepenuhnya merupakan pantjaraan kebebasan, artinya keusastraan tersebut hendaklah representatif, tidak merupakan "fausse devotion". Suatu bangsa yang tidak mempunyai keusastraan pada hakikatnya bertjermin bangkai karena keusastraanlah yang merupakan barometer besar-ketjilnya sesuatu bangsa.

Tetapi kami tahu bahwa (keusastraan) tersebut mempunyai posisi memimpin, keusastraan memimpin sesuatu bangsa, namun berbeda

dengan pimpinan peita politik tok maka kesusastraan tahu bagaimana mengatasi antinomi2 jang dapat timbul dari aspirasi2 nasional. Nasionalisme Barat dalam abad ke-XIX terdjerumus kedalam antinomi2 jang timbul dari aspirasi2 nasional Barat, karena nasionalisme Barat adalah nasionalisme politik dan bukan nasionalisme kebudayaan. Berbeda dengan nasionalisme Barat itu jang timbul sebagai konsekwensi sedjarah dari Revolusi Perantjis jang fatal itu jang symptomja tampak dalam antinomi Napoleon jang tak dapat memetjahkan dualisme antara nasionalisme Perantjis dan universalisme Eropa maka nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme kebudayaan.

Memang kami mengakui bahwa Revolusi Indonesia mendapat pengaruh Revolusi Rusia, tetapi kami melihat muntjulnja suatu persoalan jang sangat menarik, jaitu apakah Revolusi Indonesia itu mengadakan perlawanan pokok terhadap Barat sebagai kesatuan kebudayaan ataukah hanya terhadap penjakit2 jang latent dari nasionalisme Barat sebagai konsekwensi sedjarah Revolusi Perantjis itu di Eropa, karena sebagai stjara umum [kita] ketahui sekarang [kita] berhadapan dengan neo-kolonialisme jang tak lagi menampakkan dominasi politiknja, melainkan dominasi ekonomijnja sebagai suatu gejala kapitalisme Barat? Djika persoalannja itu adalah jang terachir maka dapatlah [kita] mengatakan bahwa dengan politik revolusionair sadja, artinja tanpa kebudayaan revolusionair telah tjukup, dan politik revolusionair itu nanti akan dapat merupakan "panglima" dengan pengaruh2nja jang struktural dan sistematik dibidang kebudayaan. Tetapi persoalan jang pertama itu kalau tidak dipandang sebagai sumbernja persoalan terachir, maka tidaklah dapat bangsa Indonesia memetjahkan persoalan2 pokok Revolusijnja, karena bangsa Indonesia tidaklah dapat menerima Barat sebagai kesatuan kebudayaan itu sebagai konsekwensi logik dari kenyataan bahwa orang telah meletakkan persoalan jang terachir itu, yakni bahwa Revolusi Indonesia mengadakan perlawanan pokok terhadap penjakit2 jang latent

Kelompok  
Kesejahteraan  
maha djaru

Lkami  
Fkami  
LK

Lkami

dari akibat2 Revolusi Perantjis dibenua Eropa sebagai suatu hal yang prinsipiel. <sup>121</sup>

*lingk. Bunt ?*

Telah terang sikap kami bahwa kami menjetudjui nilai2 revolusionair (anti Barat, karena sikap ini menerangkan terlihatnja dja-  
kan keluar bangsa Indonesia dalam memetjahkan persoalan2 pokok Revo-  
lusinja. Dengan ini terbukalah tabir maha- rahasia dalmoon dari myth  
Prometheus sebagai perdjuaan abadi yang dalam implikasinja adalah  
bahwa sedjarah tak akan mengenal kedewasaan politik. Tetapi dengan  
rendah hati atas kesadaran yang sedalam2nja kami menumpahkan suatu  
pengharapan bahwa dengan kebudajaan revolusionair kami akan dapat  
menembus djalan buntu yang timbul dari tidak dimilikinja perspektif  
oleh politik revolusionair yang tidak berlandaskan pada kebudajaan re-  
volusionair. ~~yang~~ Itulah sebabnja kami tidak akan menempuh dje-  
lan dari apa yang dinamakan realisme sosialis yang langsung merupakan  
kelanjutan dari konsepsi kultural Josef Stalin. Dalam tahun2 tiga-  
puluhan dengan berkebangnja Revolusi Rusia kearah fetisjisme modern,  
yaitu Stalin seakan2 mendjadi suatu suatu fetisj, barang pudjaan  
yang seakan2 mengandung suatu kekuatan gaib, maka kebudajaan Rusia  
terantjam dengan tjara yang sangat mengerikan. Dengan Stalin maka  
metodus kritik sastra adalah deduktif, artinja konsepsinja telah  
ditetapkan terlebih dahulu untuk menertibkan kehidupan kesusastraan  
dan kebudajaan.

Kami tahu bahwa pada hakikatnja dalam setiap karya  
sastra setjara diam2 telah terkandung konsepsi kritiknya. Demikianlah  
umpamanya dalam puisi2 Angkatan 45 telah setjara diam2 terkandung  
kritik terhadap puisi2 Angkatan 30. Penertiban yang dilakukan oleh  
Stalin tidak dilakukan atas kritik sastra itu an sich, melainkan  
atas kritik yang setjara diam2 telah terkandung dalam karya sastra  
itu. Adapun perbedaan kesusastraan yang belum ditertibkan dengan  
kesusastraan yang telah ditertibkan ialah bahwa konsepsi kritik yang  
dimiliki oleh sastrawannja masing2 sebagai suatu hal yang wadjar  
~~pada kesusastraan yang belum ditertibkan itu.~~

pada kesusastraan yang belum ditertibkan itu bersifat "unconscious" sedangkan pada kesusastraan yang telah ditertibkan itu "conscious".<sup>122</sup>

Dengan demikian setiap sastrawan yang telah ditertibkan setjara sad merangkap kritiknya dengan mengawasi dirinya sendiri, tetapi oleh karena dilihat dari sudut psikologi hal itu sukar dilakukan maka diperlukan kritikus professional. Tjiri pokok pada kesusastraan yang telah ditertibkan itu ialah adanya konsepsi yang sama mengenai kritik sastra. Tetapi apabila kita memperhatikan sedjarah Revolusi Rusia kita dapat menarik kesimpulan bahwa dilapangan pers terdapat kemantapan, sedang dilapangan kesusastraan tidak demikian halnya. Sebabnya ialah karena pers Sovjet mempunyai fungsi propaganda yang merupakan suara Pemerintahnya, sedangkan kesusastraan yang walaupun juga mempunyai fungsi propaganda tetapi tidak merupakan suara Pemerintahnya. Tidaklah mudah membuat puisi yang baik semudah membuat tadjuk rentjana setiap hari. Itulah sebabnya jiwa objektif sastra tidak selaras dengan realisme sosialis. Tetapi apabila realisme sosialis itu seperti yang dikemukakan oleh Maksim Gorki, maka kita menerima realisme sosialis itu apabila Gorki mengatakan bahwa sedjarah yang sesungguhnya dari rakyat pekerja tak dapat dipelajari tanpa suatu pengetahuan tentang dongengan kerakjatan yang setjara terus-menerus dan pasti mentjiptakan karya2 sastra yang bermutu tinggi seperti Faust, Petualangan Baron Munchausen, Gargantua dan Pantagruel, Thyl Eulenspiegelnya Coester, dan Prometheus disiksa karya Shelley, karena dongengan kerakjatan kuna purbakala itu menjertai sedjarah dengan tak lapuk2nya dan dengan tjarannya yang ahas.

Disini sebenarnya Gorki telah menggariskan politik sastra yang berbeda dengan realisme sosialis à la Stalin, karena Gorki telah menempuh politik sastra universal. Sesungguhnya politik sastranya itu bersumber dalam kebudayaan tidak sebagai suatu sektor politik, melainkan sebagai induknja kehidupan politik yang searah dengan garis MANIFES ini. Tetapi dengan terus-terang MANIFES ini

[kami

[kami

F dapat

ini konsep

D. Stalin

[kami



- 13 -

kreatif, dengan mana guru mengabdikan kepada murid, tetapi samudra<sup>124</sup> simurid  
 bukan madjikannya, sastrawan mengabdikan kepada pembatjanja, tetapi si-  
 pembatja bukan madjikannya, dsb. Jang penting ialah bahwa kepemimpinan  
 dan piapinan itu sanggup memerintah dengan perspektif2nja. Karena itu  
 kami menjetudjui Pidato Re-So-Pim (1961) bahwa Revolusi mutlak memer-  
 lukan pimpinan. Memang, pada hakikatnja dalam rivalitas antara kaum  
 madjikan dan kaum buruh dalam djaman liberal dahulu masalah pokoknja  
 bukanlah pertama2 perbaikan nasib kaum buruh, melainkan pengakuan status  
 sosial jang baru dari kaum buruh itu serta pengakuan keharusan dan  
 kemungkinan hubungan2 sosial jang baru. Menjisahkan faktor pimpinan  
 itu dengan akibat2nja jang luas itulah jang pada hakikatnja merupakan  
 sebab2 penjelewanja jang terdjadi dalam berbagai Revolusi umpamanya  
 Revolusi Perancis jang fatal itu. Berhubung dengan itu sekali lagi  
 kami mengulangi peringatan kami agar supaya golongan politisi djangan  
 bermain api.

### III. POLITISI DAN ESTETISI.

Berdasarkan fenomena2 sedjarah maka seorang ahli sedjarah  
 mengatakan bahwa kebudayaan dari suatu periode adalah senantiasa ke-  
 budajaan dari kelas jang berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjar-  
 kan kepada kami bahwa djustru karena tidak termasuk kedalam kelas  
 jang berkuasa mereka berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik  
 sebagai kekuatan baru jang terbentuk ditengah2 perindasan kekuatan lama  
 merupakan faktor positif jang menentukan perkembangan kebudayaan dan  
 kesenian. Selanjutnja sedjarah mengadarkan kepada kami bahwa setelah  
 kekuatan jang dibentuk oleh burdjuaasi revolusionair mendjadi sempurna  
 maka elan kepengarangannja jang menjala2 semada pembentukan kekuatan  
 itu ditengah2 perindasan monarki mutlak tidak terdapat lagi, malahan se-  
 balikknja balikknja kekuatan politik jang sempurna itu merintangij perkem-  
 bangan kebudayaan dan kesenian. Perindasan baru jang dilakukan oleh  
 kelas baru ini dibidang s-astra telah menjebakkan kekuatan baru dengan  
 lahirnja Angkatan 1830 jang mula2 dipimpin oleh Victor Hugo dan kemu-

- 14 -

dian dilandjutkan oleh Theophile Gautier.

125

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa paham politik diatas estetika yang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetika/sekondair dilihat dari sudut kebudayaan dan kesenian adalah suatu utopia yang dikalau hendak dilaksanakan dengan jujur akan memupuk dan menghasilkan perasaan2 keketjwaan, dan yang dikalau hendak dilakukan dengan tidak jujur akan dapat memupuk tipu-muslihat kaum politik yang ambisius.

dan 40 pin.  
leb ini pin  
ing kerdig.

ni sed ni  
kembag -  
kembag

ya jabat

sehat &

budjurn bay

semin

subjek /

keah

laher sunang

fatnya

rekaan

lede ilang

ni utopia

jaang

is diked

in kerdig

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena kami menjadari bahwa dunia ini bukan surga. Karena berfikir setjara dialektik maka kami mengakui kenyataan2 bahwa lingkungan sosial kami senantiasa mengandung masalah2, dan setiap tantangan yang kami jawab akan menimbulkan tantangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah berfikir tentang suatu djaman, dimana tak ada masalah lagi, karena setiap fikiran yang demikian itu adalah "idealis" dan karenanya tidak ilmiah. Pekerjaan seorang pengarang senantiasa harus dilakukan ditengah2 dunia yang penuh dengan kedjabatan, analog dengan pekerjaan seorang dokter yang senantiasa harus dilakukan ditengah2 dunia yang penuh dengan penyakit2. Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanya pengarang dan meskipun dunia ini dapat mendekati kesempurnaannya namun dunia tidak akan sempurna. Oleh karena itu paham yang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetika adalah sekondair tidak memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah menjadi sempurna tidak perlu lagi kesusastraan, tidak perlu lagi estetika. Umpamanya pada suatu ketika kekuatan politik yang kita bentuk itu telah menjadi sempurna maka masalah apakah yang akan dibahas oleh kesusastraan revolusionair yang sebagai estetika murni baru mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah yang dibahas oleh kaum estetika, yaitu mereka yang mempunyai paham estetika diatas politik, sehingga bersifat burdjuis.

kaudainya

Dengan demikian djelaslah adanya djalinan doktrinair antara kedua paham kesusastraan itu yang kedua2nya berdiri diluar djalan berfikir dialektik. MANIFES ini ingin mengjingskapkan tabir rahasia dari kedua paham kesusastraan yang terhadap fenomena2 literatur

berpegang pada "to know about" dan tidak pada "to know how". Kaum  
 esteet yang bersebojan "Estetik diatas Politik" pada waktu ini meru-  
 pakan sisa2 belaka dari alam liberal yang mengira bahwa kekuatan polit  
 yang dibentuk oleh liberalisme dalam penindasan monarki mutlak dahulu  
 kini telah merupakan suatu kekuatan yang sempurna, dan karena dalam  
 tanggapan dan perasaan mereka telah mengira aman, maka mereka itu tela  
 atjuh tak atjuh dengan politik, sehingga mereka merumuskan sembojanja  
 itu. Malanganja ialah bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa sandaran  
 politik mereka yang seungguhnya telah menimbulkan suatu pembentukan  
 kekuatan baru, jaitu kekuatan proletariat revolusionair. Teranglah  
 bahwa kaum esteet itu tidak merealisasi diri mereka bahwa manusia adal  
 homo politicus dalam arti bahwa ia harus hidup dalam suatu ikatan  
 sosial, dan karenanja harus senantiasa melaraskan dirinja dengan  
 lingkungan sosialnja itu. Dengan berpegang setjara berkepala batu  
 pada estetisme mereka akan kehilangan elan revolusionair dan seluruh  
 "keindahan" yang mereka tjiptakan hanjalah meratjuni belaka dengan  
 menimbulkan ikatan palsu yang mentjiptak mendjalinkan manusia dengan  
 lingkungan sosialnja, tetapi djustru oleh adanya ikatan itu manusia  
 merasa ora terisolasi dari lingkungan sosialnja. Thomas Mann menamakan  
 "keindahan" kaum esteet itu sebagai imperialisme estetika. Dilain pihak  
 walaupun kelihatarnja faham politik diatas estetik itu beda dengan  
 faham estetik diatas politik namun pada hakikatnja adajah sama, jaitu  
 djika dilihat dari sudut struktur mentalnja, karena proletariat revolus  
 onair pertjaja betul bahwa pada suatu ketika kekuatan politik yang  
 mereka bentuk itu akan menjadi sempurna, dan berlandaskan pada kesem-  
 purnaan kekuatan politik)se- tersebut maka pengarang2 dan seniman2  
 mereka akan mentjiptakan "keindahan2" berdasarkan pola2 neo-estetisme.

Tidaklah berlebih2an kiranja apabila kami mengambil ke-  
 simpulan bahwa faham politik diatas estetik itu tidak memberikan tempat  
 kepada estetik sebelum pembentukan kekuatan politik menjadi sempurna,  
 sehingga selama djangka waktu pembentukan kekuatan politik itu tak ada  
 persoalan tentang estetik, sedangkan faham estetik diatas politik dapat  
 didjalankan apabila mendapat sandaran kekuatan politik yang sempurna  
 pula.

H.B. JASSIN  
SIWALAN 3-JAKARTA

Maka kami dapat menarik kesimpulan <sup>kesimpulan</sup> bahwa kedua paham ~~kesusastraan~~ tersebut mengandung kontradiksi. Berbeda dengan itu adalah paham kami, yaitu paham yang tidak mengurbankan politik bagi estetika, tetapi sebaliknya, tidak pula mengurbankan estetika bagi politik, karena pengurbanan tersebut menunjukkan tidak adanya dinamika dan dalam hal tidak adanya dinamika maka fungsi estetika murni adalah suatu imperialisme estetika. Dalam kondisi ini maka transformasi revolusionair dari negara kapitalis kearah negara sosialis tidak akan menbah pula setjara revolusionair kondisi2 kulturelnya. Berlawanan Berlawanan dengan itu kami menghendaki perubahan kondisi2 kulturel itu setjara revolusionair menuju kearah masyarakat sosialis Pantja Sila.

pengantar  
(Ratnas Felanda Rosi Ds.)

Menurut kejakinan kami maka masyarakat sosialis Pantja Sila yang kami perjuangkan setjara kulturel-revolusionair itu adalah suatu keharusan sedjarah yang tak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri, sehingga tidak bisa lain yang dapat kami perbuat daripada mengumumkan kelahiran Angkatan Perlawanan Nasional ditengah2 ~~era~~ penghiratan Angkatan 50-an yang tak bertanggung jawab.

politik itu.  
Paham H. Simit  
dapat  
sangat

Demikianlah MANIFESTO ini diumumkan kepada Rakyat Indonesia dengan terus-terang dan dengan hati terbuka yang dinafasi oleh rasa rendah hati-hati.

Djakarta, 17 Agustus 1963

H.B. Jassin  
Wahsan

Nirntao Soekito  
Goenawan Mohamad  
Bokdr. Hutasuht

Wahsan  
Rumanan  
Stokdy

J. Munia  
Prusno Sumardi  
Moelwanto  
(MOELWANTO)

SOE HOK DIK  
-03  
Bar Raswanto  
Raswanto

## MANIFES KEBUDAJAAN

- Kami para seniman dan tjendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan, yang menjatakan pendirian, tjita-tjita dan politik kebudayaan Nasional kami.
- Bagi kami kebudayaan adalah perjoangan untuk menjempurn kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan diatas sektor kebudayaan yang lain. Semua sektor berjoang bersama-sama untuk tujuan kebudayaan yang sesuai dengan kodratnja.
- Dalam melaksanakan kebudayaan Nasional kami berusaha mena dengan kesungguhan yang sedjudjur-djudjurnja sebagai perjoangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa.
- Pantjasila adalah falsafah kebudayaan kami.

Djakarta, 17 Agustus 1963

H.B. Jassin  
 Trisno Sumardjo  
 Wiratno Soekito  
 Zaini  
 Bokor Hutasuhut  
 Goenawan Mohamad  
 A. Bastari Asnin  
 Bur Rasuanto  
 Soe Hok Djin  
 D.S. Moeljanto  
 Ras Siregar  
 Hartojo Andangdaja  
 Sjahwil  
 Djufri Tanlessan  
 Binsar Sitompul  
 Taufik A.G. Ismail  
 Gerson Foyk  
 M. Saribi  
 Poernawan Tjondronegoro  
 Ekana Siswojo  
 Nashar  
 Boen S. Oemarjati

### I. Pantjasila sebagai falsafah Kebudayaan

Dalam pengertian kami jang bersumber dalam hikmah Pantjasila, kebudayaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sebagai barang mati.

Dalam pengertian kami kebudayaan adalah perdjjoangan manusia sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidupnya.

Kebudayaan Nasional bukanlah semata-mata ditandai oleh "watak nasional" melainkan merupakan perdjjoangan Nasional dari suatu bangsa sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidup nasionalnya. Predikat kebudayaan adalah perdjjoangan dengan membawa konsekwensi-konsekwensi jang mutlak dari sektor-sektornja.

Sepenuhnya pengertian kami tentang kebudayaan seiringa dengan Pantjasila karena Pantjasila adalah sumbernja, sebagai mana BUNG HARR mengatakannya :

"Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pantjasila jang saja usulkan itu mendjadi suatu realiteit, jalmi djika kami ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nasionaliteit jang merdeka, jang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakanja, ialah perdjjoangan, perdjjoangan dan sekali lagi perdjjoangan". (Lih. Bagian III : Litebatur Pantjasila).

Maka pengertian Kebudayaan Nasional adalah perdjjoangan untu memperkembangkan dan mempertahankan martabat kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa. Djika kepribadian Nasional jang merupakan implikasi dari Kebudayaan Nasional kita adalah apa jang oleh Presiden Soekarno dirumuskan sebagai "Freedom to be free". Maka Kebudayaan Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jang membebaskan-diri dari penguasaan (tjampur tangan) asing tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari masyarakat bangsa-bangsa, melainkan djustru untuk menjatukan diri dengan masyarakat bangsa-bangsa itu setjara bebas dan dinamik sebagai persjajaran-persjajaran jang tidak dapat ditawar bagi perkembangan jang pesat dari Kepribadian dan Kebudayaan Nasional kita jang pandangan-dunianja bersumber pada Pantjasila.

Kami ingin membuktikan bahwa sebagai falsafah demokrasi Pantjasila menolak sembojan "The End justifies the Means" (Tudjuan menghalalkan tjara), sehingga sebagai falsafah demokrasi Pantjasila adalah humanisme kulturil jang pengedjawantahannja harus kami perdjjoangkan dalam setiap sektor kehidupannya manusia, sembojan a-kulturil "The End justifies the Means" tersebut jang tidak mengakui perbedaan antara tudjuan dengan tjara, mengakibatkan orang menudju tudjuan dengan menjisihkan pentingnja tjara mentjapai tudjuan itu.

Demikianlah umpamanja dibidang pentjiptaan karya-karya kesenian dimana orang lebih mementingkan aspek propagandanya daripada aspek keseniannya, adalah tjontoh pelaksanaan dari sembojan "The End justifies the Means" - apabila orang mengemukakan apa jang bukan kesusastraan sebagai kesusastraan, apa jang bukan kesenian sebagai kesenian, apa jang bukan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dsb.

Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karya mengalah kementahan dengan tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jang damai. Kesenian sebagai pentjiptaan karya manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuannya adalah kemanusiaan, tetapi djuga tjara-nja adalah kemanusiaan, dan itulah implikasi jang paling hakiki dari Pantjasila sebagai falsafah demokrasi jang kami perdjjoangkan setjara prinsipil.

Adapun bahaja bagi kebudayaan jang paling mengantjam datangnya dari wilajahnya sendiri, tetapi jang terang ialah bahwa sumber pokok dari bahaja tersebut terketak dalam ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif. Adapun ketjenderungan tersebut manifestasinja tidak hanja dalam pendewaan, melainkan terdapat djuga dalam pensetanan sebagai umpamanja kami kenal dalam wilajah kesenian.

Sebagaimana fetisj<sup>2</sup> itu bermatjam-matjam, demikian pulalah kesenian fetisj. Sebagaimana terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung disampir fetisjisme dari djiwa pendendam, demikianlah terdapat kesenian jang mengabdikan kepada djiwa-pelindung dengan memberikan sandjungan-sandjung setjara berlebih-lebihan pula. Tidak djarang terjadi bahwa/dua matja kesenian fetisj itu mempunyai pretensi "kesenian revolusioner", tetar dalam hal jang demikian maka kesenian fetisj itu kita namakan kesenian dengan pengabdian palsu.

Kesenian kreatif, berlawanan dengan kesenian fetisj, tidak mentjari sumbernja dalam fetisj<sup>2</sup>, melainkan dalam dirinja sendiri, sehingga dengan ini kami menolak fatalisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesenian kreatif jang kami perjuangkan dengan menjokong Revolusi tidaklah bersumber dalam fetisjisme dari djiwa penganjing, sebaliknya/mengeritik penjelewanan<sup>2</sup> dari Revolusi tidaklah pula bersumber dalam fetisjisme dari djiwa pendendam. Kami tidak memdewakan Revolusi karena kami tidak mempunyai pengabdian palsu, sebaliknya kami pun tidak mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula mempunyai pengabdian palsu. Tetapi kami adalah revolusioner.

Kami tidak lebih dari manusia lainnja, direntjanakan namun merentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dah tidak mempunyai pretensi apa-apa. Kami pun tidak akan merasa takut kepada kegagalan-kegagalan kami sendiri, karena kegagalan-kegagalan itu bukanlah akhir perjuangan hidup kami.

## II. Kepribadian dan Kebudayaan Nasional

Dalam dunia Kesenian Indonesia dikenal istilah "humanisme universal". Tafsiran kami mengenai istilah itu adalah sebagai berikut

Apabila dengan istilah "humanisme universal" dimaksudkan pengaburan kontradiksi antagonis, kontradiksi antara kawan dengan lawan, maka kami akan menolak "humanisme universal" itu. Misalnja seimana jang dilakukan oleh Nica dahulu, dimana dilulurkan kerdjasama kebudayaan disatu pihak, tetapi dilakukan aksi militer dilain pihak. Sebaliknya kami menerima "humanisme universal" apabila dimaksudkan bahwa kebudayaan dan kesenian itu bukanlah semata-mata nasional, tetapi djuga menghajati nilai-nilai ~~xxxx~~ eternal.

Apabila dengan kebudayaan universal itu jang dimaksudkan bukan kondisi objektif, melainkan perdjouangan manusia sebagai totali dalam usahanja mengachiri pertentangan antara manusia dan kemansiaan maka kami menjetudjui adjakan untuk meneruskan kebudayaan universal itu, karena dengan demikian kebudayaan universal itu merupakan "kekuatan jang menggerakkan sadjarah", dan itu sepenuhnya sama dengan pikiran kami bahwa kebudayaan universal itu adalah perdjouangan dari budi nurani universal dalam memerdekakan setiap manusia dari rantairantai belenggunja, perdjouangan jang memperdjouangkan tuntutan-tuntut Rakjat Indonesia, karena rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini tidak mau ditindas oleh bangsa-bangsa lain, tidak mau dieksploit oleh golongan<sup>2</sup> apapun, meskipun golongan itu adalah bangsanja sendiri mereka menuntut ~~xxxx~~ kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalam-negeri maupun jang karena antjaman dari luar-negeri; mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif aktivitas sosialnja, untuk memperti kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat; mereka menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak jang lazimnja dinamakan demokrasi. (lih. Bagian III : Literatur Pantjasil

Djadi "humanisme universal" djanganlah menjebakkan orang bersikap "indifferen" (atjuh tak atjuh) terhadap semua aliran (politik) sehingga dengan "humanisme universal" orang harus toleran terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kami tetap menarik garis pemisah setj tegas antara musuh<sup>2</sup> dan sekutu<sup>2</sup> Revolusi, antara musuh<sup>2</sup> dan sekutu<sup>2</sup> Kebudayaan, tetapi ini tidak berarti bahwa kami mempunyai sikap sekt dan chauwinis, karena sikap jang demikian itu adalah djustru mengaburkan garis pemisah tersebut.

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah anak manusia. Musuh kami adalah unsur-unsur yang membelenggu manusia, dan karena itu kami ingin membebaskan manusia itu dari rantai-rantai belenggunya. Dalam perlawanan kami terhadap musuh-musuh kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian bahwa sedjajah-dijajah manusia namun ia masih tetap memantjarkan sinar-tjahaja Ilahi, sehingga konsekwensi kami ialah bahwa kami harus menjelamatkan sinar tjahaja Ilahi tersebut.

Maka kepertjajaan yang kami kumandangkan ialah bahwa manusia adalah makhluk yang baik, dan karena itulah kami bertjita-tjita membangunkan suatu masjarakat yang kuat tjenderung kearah masjarakat manusia yang baik itu, sesuai dengan garis-garis sosialisme Indonesia.

Dengan begitu teranglah sudah posisi kami terhadap masalah "humanisme universal". Kami menampilkan aspirasi-aspirasi nasional, yaitu pengarahan kepada perbedaan diri ditengah-tengah masjarakat sa-bangsa, bagi merealisasi kehormatan, martabat (dignitas), prestasi dan pengaruh, tetapi kami ingin mendjaga agar supaya pengarahan tersebut tidak menudju kearah kesombongan nasional dan chauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Adapun implikasi dari aspirasi nasional ini ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannya, artinya bangsa Indonesia dapat terus-menerus menjesuaikan diri dengan perkembangan disekitarnya, tetapi tjarannya adalah unik dan dinamik. Untuk dapat mempunyai sifat dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa harus mempunyai kesenian sebagai sektor kehidupan kebudayaan, yaitu kesenian yang sepenuhnya merupakan pantjaraan kebebasan, kesungguh-sungguhan yang sedjudjur-djudjurnya.

### III. Politisi dan Estetisi

Dalam dunia kesenian Indonesia djuga dikenal istilah "realisme-sosialis". Menurut sedjarahnja, penafsiran tentang realisme-sosialis itu ada dua matjan :

Jang pertama : Realisme sosialis langsung merupakan kelanjutan dari konsepsi kulturil Josef Stalin. Dalam tahun-tahun 30 an dengan berkembangnja fetisjisme modern dengan Stalin sebagai suatu fetisj, barang pudjaan yang seakan-akan mengandung suatu kekuatan gaib, maka kebudayaan Rusia terantjan dengan amat mengerikan. Dengan Stalin maka metode kritik seni adalah deduktif, artinya konsepsinya telah ditetapkan lebih dahulu untuk "menertibkan" kehidupan kesenian dan kebudayaan. Tjiri pokok pada kesenian, yang telah "ditertibkan" itu ialah adanya konsepsi yang sama ~~yang~~ dan sektariat mengenai kritik seni. Itulah sebabnja maka jiwa objektif yang berpangkal pada budi-nurani universal tidak selaras dengan realisme sosialis, sehingga kami menolak realisme sosialis dalam pengertian itu, dimana dasarnya ialah faham politik diatas estetika.

Jang kedua : Realisme sosialis menurut kesimpulan kami dari djalan pikiran Maxim Gorki, yang dipandang sebagai otak dari realisme sosialis itu, ialah bahwa sedjarah yang sesungguhnya dari rakyat pekerdja tak dapat dipeladjadi tanpa suatu pengetahuan tentang dongengan karakjatan yang setjara terus-menerus dan pasti mentjiptakan karya sastra yang bermutu tinggi seperti Faust, Petualangan Bar von Munchhausen, Gargantua dan Pantagruel, Thyl Eulenspiegelnja Coster, dan Prometheus Disiksa karya Shelley, karena dongengan kerajinan kuna purbakala itu menjertai sedjarah dengan tak lapuk-lapuknja dan dengan tjara yang khas.

Disitu sebenarnya Gorki telah manggarikan politik sastra yang berbeda dengan realisme sosialis ala Stalin, karena pada akibatnja Gorki telah menempuh politik sastra universal. Sesungguhnya politik sastranja itu bersumber dalam kebudayaan tidak sebagai suatu sektor politik, melainkan sebagai indukja kehidupan politik yang searah dengan garis Manifes ini.

Berdasarkan fenomena2 sedjarah maka seorang ahli sedjarah mengatakan bahwa kebudayaan dari suatu ~~mas~~ periode adalah senantiasa kebudayaan dari kelas yang berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjar bahwa djustru karena tidak termasuk dalam kelas yang berkuasa maka orang berhasil membentuk kekuatan baru.

Dan politik, sebagai kekuatan baru yang terbentuk ditengah-tengah penindasan kekuatan lama, merupakan faktor positif yang menentukan perkembangan kebudayaan dan kesenian. Sebagaimana terdjadi di Perantj sedjarah mengajarkan bahwa kekuatan yang dibentuk oleh bordjuasi revolusioner adalah kekuatan yang menentukan dalam melawan penindas monarki mutlak. Tetapi sajang, bahwa elan kreativitas yang menjalannya bersama-sama kekuatan baru itu menjadi padam setelah kekuatan bordjuasi revolusioner itu menjadi sempurna. Bahkan kekuatan politik yang sempurna itu merintang kebudayaan dan kesenian. Penindasan baru yang dilakukan oleh kelas baru itu dibidang kesenian dan kesusastraan khususnja telah menjebabkan timbulnja suatu kekuatan baru dengan lahirnja Angkatan 1830 yang mula-mula dipelopori Victor Hugo dan kemudian dilanjutkan oleh Theophile Gautier.

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas estetik yang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estet adalah sekunder, dilihat dari sudut kebudayaan dan kesenian adalah suatu utopia. Sebab paham itu dikalau dilaksanakan dengan djudjur hanya akan memupuk dan menghasilkan perasaan-perasaan keketjwaan, dan dikalau dilaksanakan dengan tidak djudjur akan dapat merupakan tipu-muslihat kaum politisi yang ambisius.

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena kami menjadari bahwa dunia ini bukan sorga. Karena berfikir setjara dialektik maka kami mengakui kenyataan-kenyataan bahwa lingkungan sosial kami sehantiasa mengandung masalah-masalah, dan setiap tantangan yang kami djawab akan menimbulkan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah berfikir tentang suatu ~~masalah~~ djaman, dimana tak ada masalah lagi, karena setiap pikiran yang demikian itu adalah terlalu "idoalis" dan karenanja tidak ilmiah. Pekerjaan seorang seniman sehantiasa harus dilakukan ditengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah-masalah, analog dengan pekerjaan seorang dokter yang sehantiasa harus dilakukan ditengah-tengah dunia yang penuh dengan penjakit-penjakit. Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanya seniman. Oleh karena itu faham yang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estetik adalah sekunder tidak memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah mondjadi sempurna maka tidak perlu lagi kesusastraan dan kesenian, tidak perlu lagi estetika. Seandainya pada suatu ketika kekuatan politik yang dibentuk itu telah menjadi sempurna, maka masalah apakah yang akan dibahas oleh kesenian revolusioner yang sebagai estetik murni baru mulai sesudah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah yang dibahas oleh kaum estet, ja mereka yang mempunyai faham estetik diatas politik, sehingga bersifat bordjuis.

Tidaklah berlebih-lebihan kiranya apabila kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas estetik itu tidak memberikan tempat kepada estetik sebelum pembentukan kekuatan politik menjadi sempurna, sehingga selama djangka waktu pembentukan kekuatan politik itu tidak ada persoalan tentang estetik, sedangkan faham estetik diatas politik hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat sandaran kekuatan politik yang sempurna pula.

Maka kami dapat menarik kesimpulan selanjutnja, bahwa ke faham kesenian tersebut mengandung kontradiksi-kontradiksi. Berbedanya dengan itu adalah faham kami, jaitu faham yang tidak mengorbankan politik dan estetik, tetapi sebaliknya, tidak pula mengorbankan estetik bagi politik, karena pengorbanan tersebut tidak memundjuk adanya dinamika, dan didalam hal tidak adanya dinamika maka fungsi estetik murni adalah suatu imperialisme estetik. Dalam kondisi ini maka transformasi revolusioner dari negara kapitalis kearah negara sosialis tidak akan mengubah pula setjara revolusioner kondisi-kondisi-kondisi kulturilnja. Berlawanan dengan itu kami menghendaki perubahan kondisi-kondisi kulturil itu setjara revolusioner kearah kearah masyarakat sosialis Pantjasila.

Menurut kejakinan kami maka masyarakat sosialis Pantjasila yang kami perdjoangkan setjara kulturil-revolusioner itu adalah suatu keharusan sedjarah yang tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri.

Demikianlah penjelasan Manifes ini diumumkan.

5

Djakarta, 17 Agustus 1963

H.B. Jassin  
Trisno Sumardjo  
Wiratmo ~~Sukito~~ Soekito  
Zaini  
Bokor Hutasuhut  
Goenawan Mohamad  
A. Bastari Asnin  
Bur Rasuanto  
Soe Hok Djin  
D.S. Moeljanto  
Ras Siregar  
Hartojo Andangdjaja  
Sjahwil  
Djufri Tanissan  
Binsar Sitompul  
Taufik A.G. Ismail  
Gerson K. Poyk  
M. Saribi  
Poernawan Tjondronegoro  
Ekana Biswojo  
Nashar  
Boen S. Oemarjati

Lampiran : Rancangan Naskah Manifes Kebudayaan<sup>1</sup>

## RANCANGAN NASKAH MANIFES KEBUDAYAAN SEBUAH MANIFES KEBUDAJAAN

KAMI, pengarang<sup>2</sup>, pelukis<sup>2</sup>, pemusik<sup>2</sup>, tcendekiawan<sup>2</sup> Indonesia dengan ini mengumumkan SEBUAH MANIFES KEBUDAJAAN, karena telah tibalah saatnja untuk dengan terang<sup>2</sup>-an menjatakan pendirian, tjita<sup>2</sup> dan politik kebudayaan nasional kami.

Telah terbukti adanja ketakutan<sup>2</sup> dari hati jang kerdil terhadap kaum budajawan Indonesia jang dengan patriotisme dan ketjintaannya mendjalankan kegiatan<sup>2</sup> kreatifnja sebagai pengabdian jang mutlak kepada Tuhan, nusa dan bangsa, demokrasi, humanisme dan sosialisme.

Sesungguhnya regenerasi revolusi Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan dgn regenerasi kebudayaan Indoesia. Oleh sebab itu kami jang mendukung MANIFES ini hendak menjatakan pendirian kami jang terus-terang bahwa kami tidak dapat pula menempuh djalan apa jang dinamakan humanisme universal oleh apa jang dinamakan Angkatan 45 karena digurui oleh doktrin<sup>2</sup> kebudajaan jang tidak sesuai dengan kondisi<sup>2</sup> objektif kami; tetapi sebaliknya kami tidak dapat pula menempuh djalan apa jang dinamakan realisme sosialis oleh sedjumlah pengarang dan seniman dalam tahun<sup>2</sup> 50-an karena digurui pula oleh doktrin<sup>2</sup> kebudajaan jang tidak sesuai dgn kondisi<sup>2</sup> objektif kami.

MANIFES kami ini akan membuktikan dgn se-terang<sup>2</sup>-nja bahwa kami bukanlah pelarian kaum politisi jang berlindung dibalik topeng kebudajaan karena bagi kami kebudajaan tidaklah merupakan sub-ordinasi politik, dan oleh karena itulah kami bukan politisi, melainkan karjawan<sup>2</sup> jang sebagai konsekwensi jg tak mungkin kami hindari bermaksud mengamankan Revolusi Indonesia, bukan dgn tjara jg defensif sadja, tetapi terutama dgn tjara jg sekreatif<sup>2</sup>-nja. Oleh karena itu tidaklah perlu diherankan apabila kami berlandaskan PANTJASILA sbg falsafah kebudajaan kami.

### I. KEPRIBADIAN DAN KEBUDAJAAN NASIONAL

Dalam pengertian kami jg bersumber dlm hikmah PANTJASILA kebudajaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sbg barang mati.

Dlm pengertian kami kebudajaan adalah perdjoangan manusia sbg totalitas dlm menjempurnakan kondisi<sup>2</sup> hidupnja. Oleh sebab itu pula maka Kebudayaan Nasional bukanlah semata<sup>2</sup> ditandai oleh “watak nasional”, tetapi Kebudayaan

---

<sup>1</sup> Selain menampilkan fotokopi naskah rancangan Manifes Kebudayaan dan naskah Manifes Kebudayaan sebagai bukti autentik yang mendukung penelitian ini, penulis juga melampirkan naskah rancangan Manifes Kebudayaan dan naskah asli Manifes Kebudayaan yang telah diketik ulang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam membaca naskah tersebut. Penulisan lampiran tersebut disesuaikan dengan naskah asli. Oleh karena itu, penulisan lampiran tersebut tidak mengalami perubahan dalam hal ejaan.

Nasional adalah perdjongan nasional dari suatu bangsa sbg totalitas dlm menjempurnakan kondisi2 hidup nasionalnja.

Djadi predikat kebudajaan adalah perdjongan dgn membawa konsekwensi2 jg mutlak dari sektor2-nja, seperti kesusastraan dan kesenian. Dari sinilah kami harus mendjelaskan kepada mereka jg masih dapat terpengaruh oleh pendapat2 jg meragu2-kan revolusionernja kebudajaan jg menarik semua kegiatannja sesuai dgn kekuatan2 pokoknja jg revolusioner itu.

Sepenuhnja pengertian kita tentang kebudajaan seirama dgn PANTJASILA karena PANTJASILA adalah sumbernja, apabila Bung Karno mengatakan: “Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaja PANTJASILA jg saja usulkan itu mendjadi satu realitet, yakni djika kami ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jg merdeka, jg penuh dgn perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusjawaratan, hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit jang merdeka jg penuh dgn perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dgn sociale rechtavardgheid, ingin hidup sedjahtera dan aman, dgn ke-Tuhan-an jg luas dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, ialah perdjongan dan sekali lagi perdjongan”.

Betapa djelasnja pengertian Kebudayaan Nasional sbg perdjongan untuk memperkembangkan dan mempertahankan harga-diri nasional ditengah2 masjarakat bangsa2. Djadi Kepribadian Nasional jg merupakan implikasi dari Kebudayaan Nasional kita itu adalah apa jg oleh Presiden Soekarno dirumuskan sbg “Freedom to be free”, sehingga Kebudayaan Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jg membebaskan-diri dari penguasaan (tjampurtangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari masjarakat bangsa2 melainkan djustru untuk menjatukan diri dgn masjarakat bangsa2/setjara bebas dan dinamik sbg persjaratan2 jg tak dapat ditawar bagi perkembangan jg pesat dari Kepribadian dan Kebudayaan Nasional kita jg pandangan-dunianja bersumber pada PANTJASILA.

MANIFES ini ingin membuktikan bahwa sbg falsafah demokrasi PANTJASILA menolak sembojan: “The End Justifies the Means” tsb., pendeknja apabila tidak diakui perbedaan antara tudjuan dan tjara sehingga orang menudju tudjuan dgn menjisihkan kepentinganja tjara mentjapainja. Demikianlah umpamanja di bidang pentjiptaan karja2 artistik dimana orang lebih mementingkan aspek propagandanja daripada aspek kesusastraannja, adalah setjara corralair merupakan pelaksanaan dari sembojan “The End Justifies and The Means” sbg suatu sembojan jg bertentangan dgn PANTJASILA. “The End Justifies the Means”—apabila orang mengemukakan apa jg bukan kesusastraan sbg kesusastraan, apa jg bukan kesenian sbg kesenian, apa jg bukan ilmu-pengetahuan, dsb. Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan kementahan dgn tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jg damai, dimana dapat dilakukan pendidikan jg paling sempurna. Kesenian sbg penjiptaan karja manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuan adalah kemanusiaan, tetapi apabila tjaranja adalah kemanusiaan dan itulah implikasi jg paling esensial dari PANJTASILA sbg falsafah demokrasi jg kami perdjongkan setjara prinsipiil.

Dalam perdjongan itu kami menghadapi dua matjam bahaja:

Pertama, bahaja jg pertama datangnja dari pendidik2 gadungan jg mengatas nama pendidikan nasional mengambil pola kebudajaan asing sebagai konsep pendidikan nasional.

Kedua, bahaja jg lain datangnja dari ketjenderungan pendidik gadungan pula jg mengadjarkan pemudjaan2 demikian rupa, sehingga menimbulkan kebekuan kebudajaan.

Adapun bahaja bagi kebudajaan jg paling mengantjam datangnja dari wilayahnja sendiri, tetapi jg terang inilah bahwa sumber pokok dari bahaja tsb terletak dlm ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif. Memang ketjenderungan tsb manifestasinja tidak hanja dlm pendewaan, melainkan terdapat djuga dlm pensjetanan sbg umpamanja jg kami kenal dlm wilajah kesusastraan. Sbg mana fetisj2 itu bermatjam2, demikianlah pula kesusastraan2 fetisj. Sbg mana terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung di samping fetisjisme dari djiwa-pendendam, demikianlah kesusastraan jg mengabdikan kepada djiwa-pelindung dgn memberikan sandjungan2 setjara ber-lebih2-an, berikan fitnahan2 setjara ber-lebih2-an pula. Tidak djarang terdjadi bahwa kedua matjam kesusastraan fetisj itu mempunjai pretense “kesusastraan revolusioner”, tetapi dlm halnja demikian maka kesusastraan2 fetisj itu kita namakan kesusastraan dgn “fausse devotion” sbg pengabdianja, jaitu pengabdian pura2.

Kesusastraan kreatif, berlawanan dgn kesusastraan fetisj, tidak mentjari sumbernja dlm fetisj2, melainkan dlm dirinja sendiri, sehingga dgn ini kami menolak fetisjisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesusastraan seperti itu djika menjokong revolusi tidaklah bersumber dlm fetisjisme dari djiwa-pelindung, sebaliknya djika mengkritik ekses2 revolusi tidaklah pula bersumber dlm fetisjisme dari djiwa pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunjai “fausse devotion”; sebaliknya kamipun tidak mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula mempunjai “fausse devotion”. Tetapi kami adalah revolusionair!

Kami tidak lebih daripada manusia lainnja, direntjanakan namun merentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dan tidak mempunjai pretense apa2. Oleh sebab itulah maka kami tidak pernah mengharamkan pertolongan dari daja-kekuatan gaib, melainkan pertjaja kepada diri sendiri, karena kegagalan2 kami sendiri, karena kegagalan2 itu bukanlah achir perdjungan hidup kami.

Dengan ini kami bermaksud mempertegas sikap demokrasi dalam menghadari masalah2 Kebudajaan Nasional.

## II. KAUM POLITISI DAN KARYAWAN

Ada tiga tafsiran tentang humanisme universal, tafsiran2 mana perlu kami kemukakan. Tafsiran jang pertama bersumber dalam surat-kepertjajaan “Gelanggang Seniman Merdeka” jang disusun pada tanggal 18 Februari 1950: “Kami adalah ahli waris jang sah dari kebudajaan dunia dan kebudajaan ini kami teruskan dengan tjara kami sendiri”. Hampir seluruh pengertian kami tentang kebudajaan, karena bagi kami kebudajaan bukanlah kondisi objektif, sehingga tidaklah mungkin kita menerima warisan kebudajaan, apalagi kebudajaan dunia. Teranglah sudah bahwa jang dimaksudkan dengan kebudajaan dunia adalah

kebudajaan Barat. Kami akan menerangkan bahwa sekiranya demikianlah adanya maka kami menolak humanisme universal itu.

Tafsiran jang kedua bersumber dalam konsekwensi logik dari alam-fikiran Mau Tse-Tung tentang kontradiksi, dimana Pemimpin Tiongkok itu mengatakan bahwa kontradiksi itu ada dua matjam, jaitu adalah kontradiksi dengan lawan, dan jang terachir adalah kontradiksi dengan kawan sendiri. Humanisme universal menurut tafsiran jang kedua itu bermaksud mengaburkan perbedaan antara kedua matjam kontradiksi itu, dengan perkataan lain bermaksud mengaburkan garis pemisah antara lawan dan kawan. Kami akan menerangkan bahwa sekiranya demikianlah adanya sebagai jang dilakukan oleh Nica dahulu, dimana diulurkan kerdjasama kebudayaan disatu fihak, tetapi dilakukan aksi militair dilain fihak, maka kami menolak humanisme universal itu.

Tafsiran jang ketiga bersumber dalam djalan fikiran bahwa kebudayaan dan kesusastraan itu adalah semata2 nasional, sehingga kebudayaan dan kesusastraan jang universal harus ditolak, maka kami akan menerangkan bahwa kami menerima humanisme universal.

Memang benarlah bahwa ketjenderungan kulturil dalam menghajati nilai2 universal, tetapi meneruskan kebudayaan dunia dalam arti memandang kebudayaan dunia itu sebagai kondisi2 objektif, sebagai warisan sedjarah, dilihat dari sudut ilmiah dan psikologi tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan. Pikiran tentang kebudayaan dunia sebagai jang dirumuskan oleh Surat-Kepertjajaan Seniman Muda itu dipandang dari sudut idealisme anak2 muda jang belum mempunyai dasar berfikir jang kuat dapatlah kita mengerti, tetapi dalam fikiran kami kebudayaan dunia itu tidak ada, dan tidak akan pernah ada. Pengertian kebudayaan dunia itu terlalu luas, dan karenanja terlalu kabur. Kami mengetahui bahwa kemanusiaan adalah tunggal, tetapi itu tidak berarti bahwa kebudayaanpun adalah tunggal. Malahan fikiran jang beranggapan bahwa kebudayaan adalah tunggal pantaslah kita tjurigai, bukan oleh karena kita tidak setuju dengan kebudayaan jang universal, melainkan karena fikiran seperti itu memungkinkan timbulnja imprealisme kebudayaan sebagai suatu nafsu untuk meradjai negeri dan bangsa lain di lapangan kebudayaan.

Tetapi apabila dengan kebudayaan dunia itu jang dimaksud bukan kondisi objektif, melainkan perdjungan manusia sebagai totalitas dalam usahanja mengachiri pertentangan antara manusia dan kemanusiaan, maka kita menyetudjui adjakan untuk meneruskan kebudayaan dunia itu, karena dengan demikian kebudayaan dunia itu merupakan "the motive force of history", dan itu sepenuhnya sama dengan fikiran kita bahwa dunia itu adalah perdjungan dari budi nurani universal dalam memerdekakan setiap manusia dari kungkungan2-nja, perdjungan jang memperdjungkan tuntutan2 Rakjat Indonesia, karena Rakjat di mana2 dibawah kolong langit ini tidak mau ditindas oleh bangsa2 lain, tidak mau dieksploitir oleh golongan2 apapun meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri; mereka menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalam-negeri, maupun jang karena antjaman dari luar-negeri; mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif aktivitas sosialnja, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masjarakat; mereka menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak2 jang lazimnja dinamakan demokrasi.

Apabila itulah pengertiannya tentang humanisme universal, maka kami menerima humanisme universal itu. Tetapi apabila lain halnya maka kami pun mempunyai sikap yang lain pula terhadap humanisme universal itu. Umpamanya humanisme universal yang diartikan orang bahwa humanisme universal itu mengadakan orang untuk bersikap “indifferent” terhadap semua aliran (politik), sehingga dengan humanisme universal orang harus toleran terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kami tetap menarik garis pemisah setajam tegas antarmusuh<sup>2</sup> dan sekutu<sup>2</sup> Revolusi, antara musuh<sup>2</sup> dan sekutu<sup>2</sup> Kebudajaan, tetapi ini tidak berarti bahwa kami mempunyai sikap sektaris dan chauvinis, karena sikap yang demikian itu adalah justru mengaburkan garis pemisah tersebut. Apabila kami menentang kolonialisme Belanda maka itu tidaklah berarti bahwa kami membentji setiap orang Belanda, malahan kalau kami membentji kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka itu tidaklah berarti bahwa kami membentji orang yang melakukan kejahatan itu.

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah manusia. Musuh kami adalah unsur<sup>2</sup> yang membelenggu manusia, dan karenanya kami ingin membebaskan manusia itu dari belenggunya. Dalam perlawanan kami terhadap musuh<sup>2</sup> kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian bahwa sedjahat<sup>2</sup>nya manusia namun ia masih tetap memantjarkan sinar-tjahaja Illahi, sehingga konsekuensi kita ialah bahwa kita harus menjelamatkan sinar-tjahaja Illahi tersebut.

Maka kepertajaan yang kami kumandangkan ialah bahwa manusia adalah makhluk yang baik, dan karena itulah maka kami bertjita<sup>2</sup> membangunkan suatu masyarakat yang kuat tjenderung kearah masyarakat manusia yang baik itu. Maka dengan pendek dapatlah kami mengatakan bahwa penilaian terhadap humanisme universal sebagai humanisme yang mengaburkan aliran<sup>2</sup> politik yang impilkasinja ialah ko-eksistensi dan toleransi antara nasionalisme dan kolonialisme, adalah penilaian terhadap humanisme universal pseudo.

MANIFES ini menjatakan dengan tegas<sup>2</sup> bahwa dilapangan ideologi tidak terdapat ko-eksistensi dan toleransi, karena ko-eksistensi dan toleransi itu hanya terhadap dilapangan hubungan antar-manusia, jaitu semata<sup>2</sup> dalam hubungan sosial saja. Tetapi di samping itu MANIFES ini dengan tegas<sup>2</sup> pula menjatakan bahwa ketjenderungan naif yang mengaburkan imperialisme dengan imperialis, kapitalisme dengan kapitalis, komunisme dengan komunis, dsb. mengandung benih<sup>2</sup> fanatisme, chauvinisme dan sektarisme, yang dalam pertumbuhannya nanti akan mengaburkan pula batas antara kontradiksi antagonis dan kontradiksi non-antagonis, sehingga semua kontradiksi non-antagonis akan berubah menjadi kontradiksi antagonis.

Persatuan yang telah kita bangunkan dengan susah-pajah ini hendaklah tidak digerogoti dari dalam oleh unsur<sup>2</sup> negatif seperti fanatisme, chauvinisme dan sektarisme itu dengan teriakan<sup>2</sup> yang menuduh sekutu<sup>2</sup>nya sendiri sebagai munafik dan sematjamnya, yang dilapangan kebudajaan teriakan itu berbunji humanisme universal, karena mentjurigai kegiatan<sup>2</sup> nasional kreatif atas dasar kompleks kurang harga diri dan iri hati semata<sup>2</sup>.

Djadi disini teranglah sudah posisi kami terhadap masalah humanisme universal itu. MANIFES ini menampilkan aspirasi<sup>2</sup> nasional, jaitu pengerahan<sup>2</sup> kepada pembedaan diri ditengah<sup>2</sup> masyarakat bangsa<sup>2</sup> bagi merealisasi kehormatan, dignitas, martabat, prestige dan pengaruh, tetapi kami ingin

mendjaga agar supaja pengarah<sup>2</sup> tersebut tidak menudju kearah kesombongan nasional dan chauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Adapun implikasi dari aspirasi<sup>2</sup> nasional ini ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa mempunjai kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannya, artinja bangsa Indonesia dapat terus-menerus menjesuaikan diri dengan perkembangan di sekitarnja, tetapi tjaranja adalah unik dan dinamik. Untuk dapat mempunjai sifat dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa haruslah mempunjai kesusastraan sebagai sektor kehidupan kebudajaan jang corollair dalam arti jang sesungguhnya, jaitu kesusastraan jang sepenuhnya merupakan pantjaraan kebebasan artinja kesusastraan tersebut hendaklah representative, tidak merupakan “fausse devotion”. Suatu bangsa jang tidak mempunjai kesusastraan pada hakikatnja bertjermin bangkai karena kesusastraanlah jang merupakan barometer besar-ketjilnja suatu bangsa.

Tetapi kami tahu bahwa kesusastraan tersebut mempunjai posisi memimpin, kesusastraan memimpin sesuatu bangsa, namun berbeda dengan pimpinan politik tok maka kesusastraan tahu bagaimana mengatasi antinomi<sup>2</sup> jang dapat timbul dari aspirasi<sup>2</sup> nasional. Nasionalisme Barat dalam abad ke-XIX terdjermus ke dalam antinomi<sup>2</sup> jang timbul dari aspirasi<sup>2</sup> nasional Barat, karena nasionalisme Barat adalah nasionalisme politik dan bukan nasionalisme kebudajaan. Berbeda dengan nasionalisme Barat itu jang timbul sebagai konsekwensi sedjarah dari Revolusi Perantjis jang fatal itu jang symptomnja tampak dalam antinomi Napoleon jang tak dapat memetjahkan dualisme antara nasionalisme Perantjis dan universalisme Eropa maka nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme kebudajaan.

Memang kami mengakui bahwa Revolusi Indonesia mendapat pengaruh Revolusi Rusia, tetapi kami melihat muntjulnja persoalan jang sangat menarik, jaitu apakah Revolusi Indonesia itu mengadakan perlawanan pokok terhadap Barat sebagai kesatuan kebudajaan ataukah hanja terhadap penjakit<sup>2</sup> jang latent dari nasionalisme Barat sebagai konsekwensi sedjarah Revolusi Perantjis itu di Eropa, karena sebagai setjara umum kita ketahui sekarang kita berhaapan dengan neo-kolonialisme jang tak lagi menampakkan dominasi politiknja, melainkan dominasi ekonominja sebagai suatu gejala kapitalisme Barat? Djika persoalannya itu adalah jang terachir maka dapatlah kita mengatakan bahwa dengan politik revolusionair sadja, artinja tanpa kebudajaan revolusionair telah tjukup, dan politik revolusionair itu nanti akan dapat merupakan “panglima” dengan pengaruh<sup>2</sup>nja jang strukturel dan sistematik dibidang kebudajaan. Tetapi persoalan jang pertama itu kalau tidak dipandang sebagai sumbernja persoalan terachir, maka tidaklah dapat bangsa Indonesia memetjahkan persoalan<sup>2</sup> pokok Revolusinja, karena bangsa Indonesia tidaklah dapat menerima Barat sebagai kesatuan kebudajaan itu sebagai konsekwensi logik dari kenjataan bahwa orang telah meletakkan persoalan jang terachir itu, yakni bahwa Revolusi Indonesia mengadakan perlawanan pokok terhadap penjakit<sup>2</sup> jang latent dari akibat<sup>2</sup> Revolusi Prantjis dibenua Eropa sebagai suatu hal jang prinsipiel.

Telah terang sikap kami bahwa kami menjetudju nilai<sup>2</sup> revolusionair anti Barat, karena sikap ini menerangkan terlihatnja djalan keluar bangsa Indonesia dalam memetjahkan persoalan<sup>2</sup> pokok Revolusinja. Dengan ini terbukalah tabir rahasia daimoon dari mythos Prometheus sebagai perdjjuangan abadi jang dalam impikasinja adalah bahwa sedjarah tak akan mengenal kedewasaan politik. Tetapi

dengan rendah hati atas kesadaran yang sedalam2nya kami menumpahkan suatu pengharapan bahwa dengan kebudayaan revolusionir kami akan dapat menembus jalan buntu yang timbul dari tidak demikiannya perspektif oleh politik revolusionair yang tidak berlandaskan pada kebudayaan revolusionair. Itulah sebabnya kami tidak akan menempuh jalan dari apa yang dinamakan realisme sosialis yang langsung merupakan kelanjutan dari konsepsi kultural Josef Stalin. Dalam tahun2 tiga puluhan dengan berkembangnya Revolusi Rusia kearah fetisjisme modern, yaitu Stalin seakan2 mengandung suatu kekuatan gaib, maka kebudayaan Rusia terantjam dengan tjara yang sangat mengerikan. Dengan Stalin maka metodus kritik sastra adalah deduktif, artinya konsepsinya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menertibkan kehidupan kesusastraan dan kebudayaan.

Kami tahu bahwa pada hakikatnya dalam setiap karya sastra setjara diam2 telah terkandung konsepsi kritiknya. Demikianlah umpamanya dalam puisi2 Angkatan 45 telah setjara diam2 terkandung kritik terhadap posisi2 Angkatan 30. Penertiban yang dilakukan oleh Stalin tidak dilakukan atas kritik sastra itu an sich, melainkan atas kritik yang setjara diam2 telah terkandung dalam karya sastra itu. Adapun perbedaan kesusastraan yang belum ditertibkan dengan kesusastraan yang telah ditertibkan ialah bahwa konsepsi kritik yang dimiliki oleh sastrawannya masing2 sebagai suatu hal yang wajar pada kesusastraan yang belum ditertibkan itu bersifat "unconscious", sedangkan pada kesusastraan yang telah diterbitkan itu "conscious". Dengan demikian setiap sastrawan yang telah ditertibkan setjara sadar merangkap kritiknya dengan mengawasi dirinya sendiri, tetapi oleh karena dilihat dari sudut psikologi hal itu sukar dilakukan maka diperlukan kritikus profesional. Tjiri pokok pada kesusastraan yang telah diterbitkan itu ialah adanya konsepsi yang sama mengenai kritik sastra. Tetapi apabila kita memperhatikan sedjarah Revolusi Rusia kita dapat menarik kesimpulan bahwa dilapangan pers terhadap kemantapan, sedang dilapangan kesusastraan tidak demikian halnya. Sebabnya ialah karena pers Sovjet mempunyai fungsi propaganda yang merupakan suara Pemerintahnya, sedangkan kesusastraan yang walaupun juga mempunyai fungsi propaganda tetapi tidak merupakan suara Pemerintahnya. Tidaklah mudah membuat puisi yang baik semudah membuat tadjuk rentjana setiap hari. Itulah sebabnya jiwa objektif sastra tidak selaras dengan realisme sosialis, tetapi apabila realisme sosialis itu seperti yang dikemukakan oleh Maksim Gorki, maka kita menerima realisme sosialis itu apabila Gorki mengatakan bahwa sedjarah yang sesungguhnya dari rakyat pekerdja tak dapat dipeladjarinya tanpa suatu pengetahuan tentang dongengan kerakjatan yang setjara terus-menerus dan pasti mentjiptakan karya2 sastra yang bermutu tinggi seperti seperti Faust, Petualangan Baron Munchausen, Gargantun dan Pantagruel, Thyl Eulensiegelnya Coster, dan Prometheus disiksa karya Shelley, karena dongengan kerakjatan kuna purbakala itu menjertai sedjarah dengan tak lapuk2nya dan dengan tjaranya yang chas.

Di sini sebenarnya Gorki telah menggaris politik sastra yang berbeda dengan realisme sosialis ala Stalin, karena Gorki telah menempuh politik sastra universal. Sesungguhnya politik sastranya itu bersumber dalam kebudayaan tidak sebagai suatu sector politik, melainkan sebagai induknya kehidupan politik yang searah dengan garis MANIFES ini. Tetapi dengan terus terang, MANIFES ini memberikan penilaian2 terhadap Marxisme:

- 1) Marxisme tidak memahami hakikat sedjarah bahwasnya dari djaman ke djaman manusia tetap sama, yaitu bahwa pimpinan dapat menerima

bentuk2 lain, tetapi pimpinannya itu harus ada dan djuga datangnya dari golongan2 jang sempat menikmati chazanah sosial dan menguasai alat2 untuk dapat memperoleh chazanah sosial itu.

- 2) Marxisme tidak memahami bahwa golongan2 rohaniawan dan feodal sebagai akibat Revolusi jang didjalankan oleh burdjuasi mengalami keruntuhan, tetapi keruntuhan itu bersifat menjeluruh dalam struktur masjaratknya, di mana golongan budak2 jang kemudian melalui pengalaman politik kemudian berubah mendjadi kelas proletariat itu termasuk tak terketjuali, sehingga dilihat setjara konservatif semua unsur dari masjarakat feodal jang diruntuhkan itu menderita akibat jang sama.
- 3) Marxisme tidak memahami bahwa dalam Revolusi Perantjis itu sebenarnja jang prinsipiel adalah pengambil-alihan pimpinan dari tangan golongan feodal oleh burdjuasi ke tangan burdjuasi.
- 4) Marxisme tidak memahami bahwa kata2 mereka sendiri: “Sebagai ganti dari masjarakat burdjuis jang lama dengan kelas2nja serta antagonisme2 kelasnja kita akan mempunjai suatu persekutuan hidup, di mana perkembangan bebas dari setiap orang mendjadi sjarat bagi perkembangan bebas dari setiap orang mendjadi sjarat bagi perkembangan bebas dari semuanja”, itu tetap tidak mengubah manusia jang mutlak memerlukan pimpinan. Dan-
- 5) Marxisme tidak memahami bahwa diktatur proletariat itu tidak ada dan tidak akan ada, melainkan jang mungkin adalah diktatur pemimpin proletariat itu.

Atas dasar inilah maka kami ingin memperdjuangkan suatu kondisi, dimana buruh tidak mengabdikan kepada madjikan, melainkan setiap kita, baik buruh maupun madjikan, mengabdikan dirinja kepada rakjat seluruhnja. Inilah jang kami namakan pengabdian kreatif, dengan mana guru mengabdikan kepada murid, tetapi simurid bukan madjikannya, sastrawan mengabdikan kepada pematjanja, tetapi si pematjanja bukan madjikannya, dsb. Jang penting ialah bahwa kepemimpinan dan pimpinan itu sanggup memerintah dengan perspektif2nja. Karena itu kami menyetudjui Pidato Re-So-Pim (1962) bahwa Revolusi mutlak memerlukan pimpinan. Memang, pada hakikatnja dalam rivalitas antara kaum madjikan dan kaum buruh dalam djaman liberal dahulu masalah pokoknja bukanlah pertama2 perbaikan nasib kaum buruh, melainkan pengakuan status sosial jang baru dari kaum buruh itu serta pengakuan keharusan dan kemungkinan hubungan2 sosial jang baru. Menjisahkan faktor pimpinan itu dengan akibat2nja jang luas itulah jang pada hakikatnja merupakan sebab2 penjelewengan jang terdjadi dalam berbagai Revolusi umpamanja Revolusi Perantjis jang fatal itu. Berhubung dengan itu sekali lagi kami mengulangi peringatan kami agar supaja golongan politisi djangan bermain api.

### III. POLITISI DAN ESTETISI

Berdasarkan fenomena2 sedjarah maka seorang ahli sedjarah mengatakan bahwa kebudayaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudayaan dari kelas jang

berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjarkan kepada kami bahwa djustru karena tidak termasuk kedalam kelas jang berkuasa mereka berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik sebagai kekuatan baru jang terbentuk ditengah2 penindasan kekuatan lama merupakan faktor positif jang menentukan perkembangan kebudajaan dan kesenian. Selandjutnja sedjarah mengadjarkan kepada kami bahwa setelah kekuatan jang dibentuk oleh burdjuasi revolusionair mendjadi sempurna maka élan kepengarangannya jang menjala2 semasa pembentukan kekuatan itu ditengah2 penindasan monarki mutlak tidak terdapat lagi, malahan sebaliknya kekuatan politik jang sempurna itu merintangikan perkembangan kebudajaan dan kesenian. Penindasan baru jang dilakukan oleh kelas baru ini dibidang sastra telah menjebakkan kekuatan baru dengan lahirnja Angkatan 1830 jang mula2 dipimpin oleh Victor Hugo dan kemudian dilandjutkan oleh Theophile Gautier.

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas estetik jang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetik sekondair dilihat dari sudut kebudajaan dan kesenian adalah suatu utopia jang djikalau hendak dilaksanakan dengan djujur akan memupuk dan menghasilkan perasaan2 keketjwaan dan jang djikalau hendak dilaksanakan dengan tidak djujur akan dapat merupakan tipu-muslihat kaum politis jang ambisius.

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena kami menjadari bahwa dunia ini bukan surga. Karena berfikir setjara dialektik maka kami mengakui kenjataan2 bahwa lingkungan sosial kami senantiasa mengandung masalah2, dan setiap tantangan jang kami djawab akan menimbulkan tangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah berfikir tentang suatu djaman, dimana tak ada masalah lagi, karena setiap fikiran jang demikian itu adalah “idealis” dan karenanja tidak ilmiah. Pekerdjaan seorang pengarang senantiasa harus dilakukan ditengah2 dunia jang penuh dengan kedjahatan, analog dengan pekerdjaan seorang dokter jang senantiasa harus dilakukan ditengah2 dunia jang penuh dengan penjakit2. Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanya pengarang dan meskipun dunia ini dapat mendekati kesempurnaannya namun dunia tidak akan sempurna. Oleh karena itu faham jang merumuskan bahwa politik adalah primair dan estetik adalah sekondair tidak memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah mendjadi sempurna tidak perlu lagi kesusastraan, tidak perlu lagi estetika. Umpamanya pada suatu ketika kekuatan politik jag kita bentuk itu telah mendjadi sempurna maka masalah apakah jang akan dibahas oleh kesusastraan revolusionair jang sebagai estetik murni baru mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah jang dibahas oleh kaum esteet, jaitu mereka jang mempunjai faham estetik diatas politik, sehingga bersifat burdjuis.

Dengan demikian djelaslah adanya djalinan doktrinair antara kedua faham kesusastraan itu jang kedua2nja berdiri diluar djalan berfikir dialektik. MANIFES ini ingin menjjelaskan tabir rahasia dari kedua faham kesusastraan jang terhadap fenomena2 literari berpegang pada “to know about” dan tidak pada “to know how”. Kaum esteet jang bersembojan “Estetik diatas politik” pada waktu ini merupakan sisa2 belaka dari alam liberal jang mengira bahwa kekuatan politik jang dibentuk oleh liberalisme dalam penindasan monarki mutlak dahulu kini telah merupakan suatu kekuatan jang sempurna, dan karena dalam tanggapan dan perasaan mereka telah mengira aman, maka mereka itu telah atjuh tak atjuh

dengan politik, sehingga mereka merumuskan sembojannja itu. Malangnya ialah bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa sandaran politik mereka jang sesungguhnya telah menimbulkan suatu pembentukan kekuatan baru, jaitu kekuatan proletariat revolusionair. Teranglah bahwa kaum esteet itu tidak merealisasi diri mereka bahwa manusia adalah homo politicus dalam arti bawa ia harus hidup dalam suatu ikatan sosial, dan karenanja harus senantiasa melaraskan dirinja dengan lingkungan sosialnja itu. Dengan berpegang setjara berkepala batu pada estetisme mereka akan kehilangan elan revolusionair dan seluruh “keindahan” jang mereka tjiptakan hanjalah meratjuni belaka dengan menimbulkan ikatan palsu jang mendjalinkan manusia dengan lingkungan sosialnja, tetapi djustru oleh adanya ikatan itu manusia merasa terisolasi dari lingkungan sosialnja. Thomas Mann menamakan “keindahan” kaum esteet itu sebagai imperialisme estetika. Dilain fihak walaupun kelihatannja faham politik diatas estetik itu beda dengan faham estetik diatas politik namun pada hakikatnja adalah sama, jaitu djika dilihat dari sudut struktur mentalnja, karena proletariat revolusionair pertjaja betul bahwa pada suatu ketika kekuatan politik jang mereka bentuk itu akan mendjadi sempurna, dan berlandaskan pada kesempurnaan kekuatan politik tersebut maka pengarang2 dan seniman2 mereka akan mentjiptakan “keindahan2” berdasarkan pola2 neo-estetisme.

Tidaklah berlebih2an kiranja apabila kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas estetik itu tidak memberikan tempat kepada estetik sebelum pembentukan kekuatan politik mendjadi sempurna, sehingga selama djangka waktu pembuatan kekuatan politik itu tak ada persoalan tentang estetik, sedangkan faham estetik diatas politik dapat didjalankan apabila mendapat sandaran kekuatan politik jang sempurna pula.

Maka kami dapat menarik kesimpulan selandjutnya bahwa kedua faham kesusastraan tersebut mengandung kontradiksi2. Berbeda dengan itu adalah faham kami, jaitu faham jang tidak mengurbankan estetik bagi politik, karena pengurbanan tersebut menundjukan tidak adanya dinamika; dan dalam hal tidak adanya dinamika maka fungsi estetik murni adalah suatu imperialisme estetika. Dalam kondisi ini maka transformasi revolusionair dari Negara kapitalis kearah negara sosialis tidak akan mengubah pula setjara revolusionair kondisi2 kulturalnja. Berlawanan dengan itu kami menghendaki perubahan kondisi2 kultural itu setjara revolusionair menudju kearah masjarakat sosialis Pantja Sila.

Menurut kejakinan kami maka masjarakat sosialis Pantja Sila jang kami perdjuaangkan setjara kultural-revolusionair itu adalah suatu keharusan sedjarah jang tak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri, sehingga tidak bisa lain jang dapat kami perbuat daripada mengumumkan kelahiran ANGKATAN PERLAWANAN NASIONAL ditengah penghianatan Angkatan 50-an jang tak bertanggung djawab itu.

Demikianlah MANIFES ini diumumkan kepada Rakjat Indonesia dengan terus terang dan dengan hati terbuka jang diinsafi oleh rasa rendah hati.

Djakarta, 17 Agustus 1963

Wiratmo Soekito  
Goenawan Mohamad  
Bokor Hutasuhut

## Lampiran

## MANIFES KEBUDAJAAN

- Kami para seniman dan tjendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifes Kebudayaan, jang menjatakan pendirian, tjita-tjita dan politik kebudayaan Nasional kami.
- Bagi kami kebudayaan adalah perdjongan untuk menjempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan diatas sektor kebudayaan jang lain. Sektor-sektor berdjoang bersama-sama untuk tudjuan kebudayaan ini sesuai dengan kodratnja.
- Dalam melaksanakan kebudayaan Nasional kami berusaha mentjipta dengan kesungguhan jang sedjujur-djudjurnja sebagai perdjongan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa.
- Pantjasila adalah falsafah kebudayaan kami.

Djakarta, 17 Agustus 1963

H. B. Jassin  
 Trisno Sumardjo  
 Wiratmo Soekito  
 Zaini  
 Bokor Hutasuhut  
 Goenawan Mohamad  
 Bastari Asnin  
 Bur Rasuanto  
 Soe Hok Djin  
 D. S. Moeljanto  
 Ras Siregar  
 Hartojo Andangdjaja  
 Sjahwil  
 Djufri Tanissan  
 Bionsar Sitompul  
 Taufik A. G. Ismail  
 Gerson Poyk  
 M. Saribi  
 Poernawan Tjondronegoro  
 Ekana Siswojo  
 Nashar  
 Boen S. Oemarjati

## PENDJELASAN MANIFES KEBUDAJAAN

### I. Pantjasila sebagai falsafah Kebudajaan

Dalam pengertian kami jang bersumber dalam hikmah Pantjasila kebudajaan bukanlah kondisi objektif, apalagi hasil sebagai barang mati.

Dalam pengertian kami kebudajaan adalah perdjjoangan manusia sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidupnja. Kebudajaan Nasional bukanlah semata-mata ditandai oleh “watak nasional” melainkan merupakan perdjjoangan Nasional dari suatu bangsa sebagai totalitas dalam menjempurnakan kondisi-kondisi hidup nasionalnja. Predikat kebudajaan adalah perdjjoangan dengan membawa konsekwensi-konsekwensi jang mutlak dari sektor-sektornja.

Sepenuhnja pengertian kami tentang kebudajaan seirama dengan Pantjasila karena Pantjasila adalah sumbernja, sebagai mana BUNG KARNO mengatakan:

“Maka dari itu djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantjasila jang saja usulkan itu mendjadi suatu realiteit, yakni djika kami ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nasionaliteit jang merdeka, jang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannya, ialah perdjjoangan, perdjjoangan dan sekali lagi perdjjoangan”. (Lih. Bagian III: Literatur Pantjasila).

Maka pengertian Kebudajaan Nasional adalah perdjjoangan untuk memperkembangkan dan mempertahankan martabat kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masjarakat bangsa-bangsa. Djika kepribadian Nasional jang merupakan implikasi dari Kebudajaan Nasional kita adalah apa jang oleh Presiden Soekarno dirumuskan sebagai “Freedom to be free”. Maka Kebudajaan Nasional kita digerakkan oleh suatu Kepribadian Nasional jang membebaskan-diri dari penguasaan (tjampurtangan) asing, tetapi bukan untuk mengasingkan diri dari masjarakat bangsa-bangsa, melainkan djustru untuk menjatukan diri dengan masjarakat bangsa-bangsa itu setjara bebas dan dinamik sebagai persjaratan-persjaratan jang tidak dapat ditawar bagi perkembangan jang pesat dari Kepribadian dan Kebudajaan Nasional kita jang pandangan-dunianja bersumber pada PANTJASILA.

Kami ingin membuktikan bahwa sebagai falsafah demokrasi Pantjasila menolak sembojan “The End Justifies The Means” (tudjuan menghalalkan tjara), sehingga sebagai falsafah demokrasi Pantjasila adalah humanisme kulturil jang pengedjawantahannya harus kami perdjjoangkan dalam setiap sektor kehidupan manusia, sembojan a-kulturil “The End Justifies The Means” tersebut jang tidak mengakui perbedaan antara tudjuan dengan tjara, mengakibatkan orang menudju tudjuan dengan menjisihkan pentingnja tjara mentjapai tudjuan itu.

Demikinalah umpamanya di bidang pentjiptaan karja-karja kesenian dimana orang lebih mementingkan aspek propagandanja daripada aspek kesusastraannya, adalah tjontoh pelaksanaan dari sembojan “The End Justifies and The Means”—apabila orang mengemukakan apa jang bukan kesusastraan sebagai kesusastraan, apa jang bukan kesenian sebagai kesenian, apa jang bukan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dsb.

Perkosaan seperti itu bukanlah tjara insanijah, melainkan tjara alamiah. Perkosaan adalah mentah sedang pentjiptaan karja mengalahkan kementahan dgn tjara manusia untuk mentjiptakan dunia jang damai, dimana dapat dilakukan pendidikan jang paling sempurna. Kesenian sebagai penjiptaan karja manusia akan abadi hanja apabila bukan sadja tudjuan adalah kemanusiaan, tetapi djuga tjaranja adalah kemanusiaan, dan itulah implikasi jang paling hakiki dari Pantjasila sebagai falsafah demokrasi jg kami perdjoangkan setjara prinsipiil.

Adapun bahaja bagi kebudajaan jang paling mengantjam datangnya dari wilayahnja sendiri, tetapi jang terang ialah bahwa sumber pokok dari bahaja tersebut terletak dalam ketjenderungan2 fetisj sebagai ketjenderungan non-kreatif. Adapun ketjenderungan tersebut manifestasinja tidak hanja dalam pendewaan, melainkan terdapat djuga dalam pensetanan sebagai umpamanja kami kenal dalam wilajah kesenian. Sebagaimana fetisj2 itu bermatjam-matjam, demikian pulalah kesenian fetisj. Sebagaimana terdapat fetisjisme dari djiwa-pelindung disamping fetisjisme dari djiwa pendendam, demikianlah terdapat kesenian jang mengabdikan kepada djiwa-pelindung dengan memberikan sandjungan-sandjungan setjara berlebih-lebihan pula. Tidak djarang terdjadi bahwa kedua matjam kesenian fetisj itu mempunyai pretense “kesenian revolusioner”, tetapi dalam hal jang demikian maka kesenian fetisj itu kita namakan kesenian dengan pengabdian palsu.

Kesenian kreatif, berlawanan dengan kesenian fetisj, tidak mentjari sumbernja dalam fetisj2, melainkan dalam dirinja sendiri, sehingga dengan ini kami menolak fatalisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Kesenian kreatif jang kami perdjoangkan dengan menjokong Revolusi tidaklah bersumber dalam fetisjisme dari djiwa pelindung, sebaliknya dengan mengeritik penjelewengan2 dari Revolusi tidaklah pula bersumber dalam fetisjisme dari djiwa pendendam. Kami tidak memperdewakan Revolusi karena kami tidak mempunyai pengabdian palsu; sebaliknya kamipun tidak mempersetankan Revolusi karena kami tidak pula mempunyai pengabdian palsu. Tetapi kami adalah revolusionair.

Kami tidak lebih dari manusia lainnja, direntjanakan namun merentjanakan, ditjiptakan namun mentjiptakan. Itu sadja dan tidak mempunyai pretensi apa-apa. Kamipun tidak akan merasa takut kepada kegagalan-kegagalan kami sendiri, karena kegagalan-kegagalan itu bukanlah achir perdjjuangan hidup kami.

## II. Kepribadian dan Kebudayaan

Dalam dunia kesenian Indonesia dikenal istilah “humanisme universal”. Tafsiran kami mengenai istilah itu adalah sebagai berikut:

Apabila dengan istilah “humanisme universal” dimaksudkan pengaburan kontradiksi antagonis, kontradiksi antara kawan dengan lawan, maka kami akan menolak “humanisme universal” itu. Misalnja semana jang dilakukan oleh Nica dahulu, dimana diulurkan kerdjasama kebudajaan disatu fihak, tetapi dilakukan aksi militer dilain fihak.

Sebaliknya kami menerima “humanisme universal” apabila dimaksudkan bahwa kebudajaan dan kesenian itu bukanlah semata-mata nasional, tetapi djuga menghajati nilai-nilai eternal.

Apabila dengan kebudayaan universal itu yang dimaksudkan bukan kondisi objektif, melainkan perjuangannya manusia sebagai totalitas dalam usahanya mengachiri pertentangan antara manusia dan kemanusiaan maka kami menyetujui adanya untuk meneruskan kebudayaan universal itu, karena dengan demikian kebudayaan universal itu merupakan “kekuatan yang menggerakkan sejarah”, dan itu sepenuhnya sama dengan pikiran kami bahwa kebudayaan universal itu adalah perjuangan dari budi nurani universal dalam memerdekakan setiap manusia dari rantai-rantai belenggunya, perjuangan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan Rakyat Indonesia, karena rakyat dimana-mana dibawah kolong langit itu tidak mau ditindas oleh bangsa-bangsa lain, tidak mau dieksploitasi oleh golongan2 apapun, meskipun golongan itu adalah bangsanya sendiri mereka menuntut kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari rasa-takut, baik yang karena antijaman didalam-negeri maupun yang karena antijaman dari luar-negeri; mereka menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif aktivitas sosialnya, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat; mereka menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yaitu menuntut hak-hak yang lazimnya dinamakan demokrasi. (Lih. Bagian III: Literatur Pantjasila).

Djadi “humanisme universal” janganlah menyebabkan orang bersikap “indeferen” (atjeh tak atjeh) terhadap semua aliran (politik) sehingga dengan “humanisme universal” orang harus toleran terhadap imperialisme dan kolonialisme. Kami tetap menarik garis pemisah setjara tegas antara musuh2 dan sekutu2 Revolusi, antara musuh2 dan sekutu2 Kebudayaan, tetapi ini tidak berarti bahwa kami mempunyai sikap sektaris dan chauvinis, karena sikap yang demikian itu adalah justru mengaburkan garis pemisah tersebut.

Musuh kami bukanlah manusia, karena kami adalah anak manusia. Musuh kami adalah unsur-unsur yang membelenggu manusia, dan karenanya kami ingin membebaskan manusia itu dari rantai-rantai belenggunya. Dalam perlawanan kami terhadap musuh-musuh kami itu kami tetap berpegang teguh pada pendirian dan pengertian bahwa sedjahat-djahatnya manusia namun ia masih tetap memantjarkan sinar-tjahaja Illahi, sehingga konsekwensi kita ialah bahwa kita harus menjelamatkan sinar-tjahaja Illahi tersebut.

Maka kepertjajaan yang kami kumandangkan ialah bahwa manusia adalah makhluk yang baik, dan karena itulah kami bertjita2 membangunkan suatu masyarakat yang kuat tjenderung kearah masyarakat manusia yang baik itu, sesuai dengan garis-garis sosialisme Indonesia.

Dengan begitu teranglah sudah posisi kami terhadap masalah “humanisme universal”. Kami menampilkan aspirasi-aspirasi nasional, yaitu pengarahan2 kepada perbedaan diri ditengah-tengah masyarakat se-bangsa, bagi merealisasi kehormatan, martabat (dignitas), prestige dan pengaruh, tetapi kami ingin mendjaga agar supaya pengarahan2 tersebut tidak menudju ke arah kesombongan nasional dan chauvinisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Adapun implikasi dari aspirasi-aspirasi nasional ini ialah bahwa bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannya, artinya bangsa Indonesia dapat terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan disekitarnya, tetapi tjaraannya adalah unik dan dinamik. Untuk dapat mempunyai sifat dinamik inilah maka bangsa Indonesia sebagai bangsa harus mempunyai kesenian sebagai sektor kehidupan kebudayaan, yaitu kesenian yang

sepenuh-penuhnya merupakan pantjaran kebebasan, kesungguh-sungguhan jang sedjujur-djuurnja.

### III. Politisi dan Estetisi

Dalam dunia kesenian Indonesia djuga dikenal istilah “realisme-sosialis”. Menurut sedjarahnja, penafsiran tentang realisme-sosialis itu ada dua matjam:

Jang pertama: Realisme sosialis langsung merupakan kelanjutan dari konsepsi kulturil Jose Stalin. Dalam tahun-tahun 30an dengan berkembangnja fetisjisme modern dengan Stalin sebagai suatu fetisj, barang pudjaan jang seakan-akan mengandung suatu kekuatan gaib, maka kebudajaan Rusia terantjam dengan amat mengerikan. Dengan Stalin maka metode kritik seni adalah deduktif, artinja konsepsinja telah ditetapkan lebih dahulu untuk “menertibkan” kehidupan kesenian dan kebudajaan. Tjiri pokok pada kesenian, jang telah “ditertibkan” itu ialah adanja konsepsi jang sama dan sektaris mengenai kritik seni. Itulah sebabnja maka djiwa objektif jang berpangkal pada budi-nurani universal tidak selaras dengan realisme sosialis, sehingga kami menolak realisme sosialis dalam pengertian itu, dimana dasarnya ialah faham politik diatas estetik.

Jang kedua: Realisme sosialisme menurut kesimpulan kami djalan pikiran Maxim Gorki, jang dipandang sebagai otak dari realis sosialis itu, ialah bahwa sedjarah jang sesungguhnya dari rakjat pekerdja tak dapat dipeladjar tanpa suatu pengetahuan tentang dongengan kerakjatan jang setjara terus-menerus dan pasti mentjiptakan karja sastra jang bermutu tinggi seperti Faust, Petualangan Bar Von Munchhausen, Gargantua dan Pantagruel. Thyl Eulensplegelnja Coster, dan Prometheus Disiksa karja Shelley, karena dongengan kerajaan kuna purbakala itu menjertai sedjarah dengan tak lapuk-lapuknja dan dengan tjara jang chas.

Disitu sebenarnja Gorki telah menggariskan politik sastra jang berbeda dengan realisme sosialis ala Stalin, karena pada hakikatnja Gorki telah menempuh politik sastra universal. Sesungguhnya politik sastranja itu bersumber dalam kebudajaan tidak sebagai suatu sektor politik, melainkan sebagai induknja kehidupan politik jang searah dengan garis Manifes ini.

Berdasarkan fenomena<sup>2</sup> sedjarah maka seorang ahli sedjarah mengatakan bahwa kebudajaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudajaan dari kelas jang berkuasa. Akan tetapi sedjarah djuga mengadjarkan bahwa djustru karena tidak termasuk kedalam kelas jang berkuasa mereka berhasil membentuk kekuatan baru. Dan politik sebagai kekuatan baru jang terbentuk ditengah-tengah penindasan kekuatan lama merupakan faktor positif jang menentukan perkembangan kebudajaan dan kesenian. Sebagaimana terdjadi di Perantjis sedjarah mengadjarkan bahwa kekuatan jang dibentuk oleh bordjuasi revolusioner adalah kekuatan jang menentukan dalam melawan penindasan monarki mutlak. Tetapi sajang, bahwa elan kreativitas jang menjala-jala bersama-sama kekuatan baru itu mendjadi sempurna. Bahkan kekuatan politik jang sempurna itu merintangki kebudajaan dan kesenian. Penindasan baru jang dilakukan oleh kelas baru itu dibidang kesenian dan kesusastraan chususnja telah menjebabkan timbulnja suatu kekuatan baru dengan lahirnja Angkatan 1830 jang mula-mula dipelopori Victor Hugo dan kemudian dilandjutkan oleh Theophile Gautier.

Maka dapatlah kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas estetik jang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estet adalah sekunder, dilihat dari sudut kebudayaan dan kesenian adalah suatu utopia. Sebab paham itu djikalau dilaksanakan dengan djujur hanja akan memupuk dan menghasilkan perasaan-perasaan keketjewaan, dan djikalau hendak dilaksanakan dengan tidak djujur akan dapat merupakan tipu-muslihat kaum politis jang ambisius.

Sebagai realis kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena kami menjadari bahwa dunia ini bukan sorga. Karena berfikir setjara dialektik maka kami mengakui kenjataan-kenjataan bahwa lingkungan sosial kami senantiasa mengandung masalah-masalah, dan setiap tantangan jang kami djawab akan menimbulkan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu kami tidak pernah berfikir tentang suatu djaman, dimana tak ada masalah lagi, karena setiap fikiran jang demikian itu adalah "idealis" dan karenanja tidak ilmiah. Pekerdjaan seorang pengarang senantiasa harus dilakukan ditengah-tengah dunia jang penuh dengan masalah-masalah, analog dengan pekerdjaan seorang dokter jang senantiasa harus dilakukan ditengah-tengah dunia jang penuh dengan penjakit-penjakit. Apabila dunia ini sudah sempurna tidak perlu lagi adanja seniman. Oleh karena itu faham jang merumuskan bahwa politik adalah primer dan estetik adalah sekunder tidak memahami realisme karena apabila kekuatan politik telah mendjadi sempurna tidak perlu lagi kesenian, tidak perlu lagi estetika. Seandainja pada suatu ketika kekuatan politik jang dibentuk itu telah mendjadi sempurna, maka masalah apakah jang akan dibahas oleh kesenian revolusionair jang sebagai estetik murni baru mulai setelah itu? Tidak lebih dan tidak kurang daripada masalah jang dibahas oleh kaum estet, jaitu mereka jang mempunjai faham estetik diatas politik, sehingga bersifat bordjuis.

Tidaklah berlebih-lebihan kiranja apabila kami mengambil kesimpulan bahwa faham politik diatas estetik itu tidak memberikan tempat kepada estetik sebelum pembentukan kekuatan politik mendjadi sempurna, sehingga selama djangka waktu pembuatan kekuatan politik itu tak ada persoalan tentang estetik, sedangkan faham estetik diatas politik hanja dapat dilaksanakan apabila mendapat sandaran kekuatan politik jang sempurna pula.

Maka kami dapat menarik kesimpulan selandjutnya, bahwa kedua faham kesenian tersebut mengandung kontradiksi-kontradiksi. Berbeda dengan itu adalah faham kami, jaitu faham jang tidak mengorbankan politik dan estetik, tetapi sebaliknya, tidak pula mengorbankan estetik bagi politik, karena pengorbanan tersebut tidak menundjukan ada adanja dinamika, dan didalam hal tidak adanja dinamika maka fungsi estetik murni adalah suatu imperialisme estetik. Dalam kondisi ini maka transformasi revolusioner dari negara kapitalis kearah negara sosialis tidak akan mengubah pula setjara revolusioner kondisi-kondisi kulturilnja. Berlawanan dengan itu kami menghendaki perobahan kondisi-kondisi kulturil itu setjara revolusioner menudju kearah masjarakat sosialis Pantjasila.

Menurut kejakinan kami maka masjarakat sosialis Pantjasila jang kami perdjoangkan setjara kulturil-revolusioner itu adalah suatu keharusan sedjarah jang tak dapat dihindarkan oleh siapapun, tetapi terutama oleh kami sendiri.

Demikianlah pendjelasan Manifes ini diumumkan.

Djakarta, 17 Agustus 1963

H. B. Jassin  
Trisno Sumardjo  
Wiratmo Soekito  
Zaini  
Bokor Hutasuhut  
Goenawan Mohamad  
Bastari Asnin  
Bur Rasuanto  
Soe Hok Djin  
D. S. Moeljanto  
Ras Siregar  
Hartojo Andangdjaja  
Sjahwil  
Djufri Tanissan  
Bionsar Sitompul  
Taufik A. G. Ismail  
Gerson Poyk  
M. Saribi  
Poernawan Tjondronegoro  
Ekana Siswojo  
Nashar  
Boen S. Oemarjati



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Saktiana Dwi Hastuti. Penulis lahir di Jakarta, 1 Oktober 1987 dari pasangan Ari Prayitno (Alm.) dan Nunuk Hartini. Penulis menyelesaikan studinya di SD 03 Pondok Kopi Jakarta Timur, SMP 199 Jakarta Timur, SMA 103 Jakarta Timur, dan Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selain aktif kuliah, ia juga aktif mengajar di beberapa lembaga bimbingan belajar sebagai pengajar Bahasa Indonesia. Ia juga pernah bergabung dalam kegiatan dan organisasi kampus seperti Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2007, menjadi Penanggung Jawab Sementara (PJS) IKSI pada 2007, dan Sekretaris Umum KOBSI (Komunitas Binaan IKSI) pada 2008. Penulis yang mengisi waktu senggangnya dengan membaca dan menonton ini juga pernah mendapat juara pertama dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa tahun 2007. Tulisannya yang berjudul “Puisi Indonesia di Masa Orde Baru” juga pernah dimuat di dalam Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya *Susastra* nomor 6 tahun 2007 yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia.